

**PERAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM)**

(Studi Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)



Oleh:

Jumsinah

2106016101

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2025

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Seminar Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi / skripsi saudara

Nama : Jumsinah

NIM : 2106016101

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi: **Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi: Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.**

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Maret 2025

Pembimbing Bidang Substansi
Materi & Tata Tulis

Dr. H. Tolkhathul Khoir, M.Ag.

NIP. 197701202005011005

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM)
Studi: Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Disusun Oleh:

Jumsinah

2106016101

Telah dipertahankan di depan meja majelis penguji siding skripsi pada tanggal 24
Maret 2025 dan telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



Ketua Sidang

Dr. H. Tolkhathul Khoir, M.Ag

NIP : 197701202005011005

sekretaris Sidang

Masrohatun, M.Si

NIP : 198806212018012001

Penguji I

Drs. H. Nur Syamsudin, M.A

NIP : 196805051995031002

Mengetahui

Pembimbing

Dr. H. Tolkhathul Khoir, M.Ag

iii

PERNYATAAN

Dengan ini saya sebagai penulis/peneliti menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM Studi Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang"** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiasi atau hasil jiplakan dari karya orang lain. Dalam penyusunan skripsi ini, saya telah mengikuti kaidah ilmiah serta mencantumkan sumber referensi yang digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau melanggar aturan akademik, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 12 Maret 2025



Jumsinah

NIM: 2106016101

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi: Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata-1 (S1) pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak dukungan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Nizar, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Terimakasih sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
2. Prof Imam Yahya M.Ag, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Muhammad Nuqlir Bariklana, selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Masrohatun M.Si yang telah memberikan ilmunya.
5. Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag, selaku dosen pembimbing terimakasih sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk memberikan arahan dan masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa studi.
7. Cinta pertama dan panutanku Alm. Bapak Jaenudin terimakasih sudah memberikan banyak pelajaran dalam hidupku, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan dan tidak bisa menyaksikan gadis kecilnya ini menempuh Pendidikan sampai sukses nanti, namun beliau

selalu memberikan kenangan yang berwarna dan pesan yang luar biasa kepadaku sehingga bisa berada di titik ini.

8. Seseorang yang sangat kuat dan sudah melahirkanku Ibu Amsanah, terimakasih untuk segala jenis dukungan, motivasi, dan do'a yang diberikan, sosok yang sangat kuat dalam menghidupi keluarga kecilnya tanpa pantang menyerah sehingga banyak memberikan pelajaran dalam hidupku, terimakasih sudah berjuang, karya sederhana ini sebagai wujud persembahan apresiasiku untukmu.
9. Kakak perempuan Sarmini yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan, nasehat dan teladan yang baik kepada penulis, terimakasih atas segala jenis dukungan yang diberikan. Serta kedua ponakanku Nabila dan Nadila terimakasih berkat kehadiran kalian menjadi semangat untukku dalam mengejar Pendidikan, kelak semoga bisa menjadi contoh baik bagi kalian.
10. Seluruh perangkat Kelurahan dan Masyarakat Kandri yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan melengkapi data skripsi.
11. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada teman seperjuangan Kopma Walisongo 2021 Dzaky, Fahri, Tsabit, Engga, Faizun, Alya, Sulis dan lainnya. Yang sudah menjadi tempat bercerita dan menjadi rumah selama penulis menempuh Pendidikan, terimakasih untuk segala dukungan dan pengalaman yang diberikan, semoga persahabatan yang terjalin memberikan motivasi besar bagi penulis untuk terus belajar dan berkembang.
12. Kepada teman-teman magang, teman-teman KKN posko 47 yang sudah menjadi bagian cerita dalam perjalanan penulis dalam menyelesaikan Pendidikan, terimakasih atas segala kesempatan dan pengalaman yang diberikan serta gerakan canda tawa yang sangat mewarnai yang tidak terlupakan.
13. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Politik C yang sudah kebersamaan penulis selama menempuh Pendidikan terimakasih untuk segala support dan dukungan yang diberikan. teman-teman Ruang Abaca yang sudah memberikan pengalaman luar biasa kepada penulis terimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk berkontribusi dalam membangun Pendidikan yang lebih baik.

14. Segenap keluarga besar GBKI yang sudah menjadi saksi dari perjalanan awal penulis dalam menempuh Pendidikan, terimakasih atas kesempatan dukungan do'a yang diberikan sehingga penulis dapat berada di titik ini.
15. Keluarga Genbi UIN Walisongo Semarang terimakasih sudah menjadi bagian perjalanan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan, terimakasih atas dukungan material dan menjadi tempat untuk mengembangkan diri.
16. Kepada teman setia selama perantauan Akbar,Vivin terimakasih sudah menjadi teman yang baik, mendengarkan segala cerita hidup selama penulis menempuh Pendidikan sampai saat ini, semoga pertemanan ini menjadi motivasi penulis untuk terus belajar dan berkembang. windy,neah, agung, nuraprini, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis selama ini, terimakasih sudah menjadi pendengar yang setia dan menjadi bagian perjalanan hidup penulis.
17. Teruntuk seseorang yang penulis tidak dapat disebutkan namanya, namun sangat berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, baik tenaga, waktu dan materi kepada penulis. Terimakasih telah menjadi rumah pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung, menghibur dalam kesedihan dan mendengar keluh kesah serta memberi semangat pantang menyerah, terimakasih sudah menjadi bagian perjalanan dalam hidup ini, semoga karya sederhana ini dapat menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan yang kita inginkan.

Semarang, 12 Maret 2025

Peneliti



Jumsinah

NIM: 2106016101

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, karya sederhana ini dipersembahkan untuk kedua orangtua tercinta, Bapak Jaenudin Alm. dan Ibu Amsanah, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa henti selama perjalananku menyelesaikan studi ini. Tanpa cinta, pengorbanan, dan motivasi yang tiada tara dari kalian, tidak akan membuatku dapat mencapai titik ini.

Bapak, terima kasih atas keteguhan hati, dan segala nasihat yang sudah membimbingku, walaupun sudah tidak bisa melihat secara langsung namun iringan doa dan ridho darimu masih tetap mengalir hangat di setiap langkahku. dan Ibu, terima kasih atas kerja keras, kelembutan, kesabaran, dan perhatian yang selalu membuatku merasa kuat dan mampu menghadapi segala tantangan. Persembahan ini tidak sebanding dengan segala pengorbanan yang sudah diberikan dan Kalian adalah sumber inspirasi terbesar dalam hidupku.

Semoga karya ini dapat menjadi wujud kecil dari rasa terima kasih dan dedikasiku untuk kalian. Semoga Allah SWT selalu memberkahi kebahagiaan, dan cinta yang abadi

MOTTO

Manusia yang paling baik di sisi Allah adalah mereka yang memberikan manfaat
sebesar-besarnya kepada sesama manusia.

-HR.Imam Ahmad-

Hidup tidak seorang diri!

-Jumsinah-

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting dalam pembangunan ekonomi daerah, selain dapat membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi UMKM juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat serta dapat mengentaskan angka kemiskinan yang berdampak besar pada perekonomian bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM di Kota Semarang. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus untuk mengetahui program dan faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM di Kelurahan Kandri. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan Jim Ife. Hasil penelitian ini menunjukkan program pemberdayaan pemerintah Kota Semarang melalui peraturan walikota No. 66 Tahun 2022 berupa 4P (pendampingan, pelatihan, pemasaran dan permodalan) namun dalam pelaksanaannya program pemasaran belum maksimal dirasakan oleh pelaku UMKM hal ini terjadi karena pelaku UMKM masih merasa kesulitan dalam administrasi untuk melakukan pemasaran melalui mitra kerjasama pemerintah Kota Semarang.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, UMKM, Pemberdayaan UMKM

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) are an important sector in regional economic development, apart from being able to help the government in economic development, MSMEs can also create jobs, increase people's income and can alleviate poverty which has a big impact on the nation's economy. This research aims to analyze the role of local government in empowering MSMEs in Semarang City. The research method uses descriptive qualitative, with a case study approach to determine the program and inhibiting factors in empowering MSMEs in Kandri Village. This research uses Jim Ife's empowerment theory. The results of this research show that the Semarang City government's empowerment program through mayoral regulation no. 66 of 2022 in the form of 4Ps (mentoring, training, marketing and capital) has been running well, but the marketing program is still experiencing obstacles in the form of administrative difficulties in carrying out marketing through cooperation partners with the Semarang City government.

Keywords: Role of Government, MSMEs, Empowerment of MSMEs

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iii
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
PEMERINTAH DAERAH DAN PEMBERDAYAAN UMKM	14
A. Konsep Peran Pemerintah Daerah	14
1. Peran Pemerintah Daerah.....	14
2. Peran Pemerintah Dalam Islam.....	16
B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	19
1. Pengertian UMKM	19
2. Kriteria UMKM.....	21
3. Jenis - Jenis UMKM	21
4. Peran UMKM dalam perekonomian	22
C. Pemberdayaan UMKM	23
1. Definisi Pemberdayaan.....	23

2. Prinsip Pemberdayaan UMKM	25
3. Pemberdayaan dalam perspektif Islam	26
D. Teori Pemberdayaan Jim Ife	27
1. Perspektif politik kekuasaan dalam teori jim ife.....	28
2. Jenis- jenis kekuasaan dalam teori Jim Ife	29
3. Strategi Pemberdayaan Jim Ife	31
BAB III.....	33
LANDSCAPE KELURAHAN KANDRI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG.....	33
A. Kelurahan Kandri.....	33
1. Kondisi Geografis.....	33
2. Kependudukan	34
3. Keagamaan	35
4. Kondisi Ekonomi.....	36
5. Tingkat Pendidikan.....	37
6. Pemerintahan	37
B. Profil UMKM Mekarsari	39
BAB IV	42
PROGRAM PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA SEMARANG.....	42
A. Pendampingan.....	43
B. Pelatihan	47
C. Pemasaran.....	50
BAB V.....	55
FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM DI KELURAHAN KANDRI	55
A. Faktor struktural	55
1. Regulasi dan Kebijakan Yang Kurang Mendukung Error! Bookmark not defined.	
2. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya.....	55
B. Faktor Sumber Daya Manusia.....	57
BAB VI	62
KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah penduduk Kelurahan Kandri Tahun 2023	35
Tabel 3. 2 Data Penduduk berdasarkan Agama di Kelurahan Kandri tahun 2023	35
Tabel 3. 3 Jumlah tempat ibadah di Kelurahan Kandri tahun 2023.....	36
Tabel 3. 4 Data Penduduk Berdasarkan Pencaharian.....	36
Tabel 3. 5 Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan	37
Tabel 3. 6 Struktur Organisasi Kelurahan Kandri tahun 2023.....	38
Tabel 3. 7 Daftar UMKM Kelurahan Kandri.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kelurahan Kandri	34
Gambar 2 Pendampingan Fasilitas Perizinan.....	45
Gambar 3 Pendampingan Fasilitas Perizinan.....	45
Gambar 4 Pendampingan Pelayanan Akhir Pekan.....	46
Gambar 5 Pendampingan Pelayanan Akhir Pekan.....	46
Gambar 6 Pendampingan Pelayanan Akhir Pekan.....	47
Gambar 7 Pendampingan Pelayanan Akhir Pekan.....	47
Gambar 8 Program Pelatihan UMKM	49
Gambar 9 Program Pelatihan UMKM	49
Gambar 10 Pelatihan Pengemasan	50
Gambar 11 Pelatihan Pengemasan	50
Gambar 12 Galeri Seni Dan Rasa Bandara Ahmad Yani	52
Gambar 13 Galeri Seni Dan Rasa Bandara Ahmad Yani	52
Gambar 14 Fasilitas Akses Pembiayaan	54

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Lampiran 1 Pertanyaan Penelitian	67
Daftar Lampiran 2 Dokumentasi Bersama Narasumber	70
Daftar Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan UMKM Kelurahan Kandri.....	72
Daftar Lampiran 4 Dokumentasi Pendukung.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha masyarakat yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Rahmah et al., 2020). UMKM menjadi sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya menunjukkan kemampuan untuk memperkecil kesenjangan pendapatan atau mengentaskan kemiskinan (Harahap & Tambunan, 2022).

Dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, kebijakan pembangunan pemerintah diarahkan untuk mendorong potensi dan keterlibatan aktif UMKM dalam proses pembangunan nasional, khususnya pada kegiatan ekonomi (Habib, 2021). Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM pada pasal 6 berbunyi bahwa pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Usaha. Di era globalisasi saat ini, sektor bisnis berkembang dengan pesat UMKM serta kewirausahaan merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang besar terhadap penciptaan lapangan kerja (fariza,2021). Namun demikian sektor yang membangun perekonomian tanah air ini tidak lepas dari permasalahan seperti minimnya modal, perizinan, manajemen keuangan, minimnya inovasi produk, dan sulitnya dalam melakukan pengembangan bisnis sehingga membuat UMKM sulit untuk berkembang (Siregar & Mersi, 2021). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan UMKM pada pasal 7 ayat 3 berbunyi ruang lingkup pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup: pengembangan sumber daya

manusia, Pembiayaan dan peminjaman, produksi dan produktivitas, kemitraan dan jejaring usaha, fasilitas perizinan dan standarisasi, dan pemasaran.

Dalam peraturan diatas sudah dijelaskan bahwa pemerintah selaku pemangku kekuasaan sudah semestinya melakukan dan memfasilitasi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Namun dalam kenyataannya UMKM masih banyak mengalami kesulitan dalam mengembangkan jaringan pemasaran dan memperluas jangkauan pasar, baik secara lokal maupun internasional karena masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan dalam hal pemasaran digital, serta kurangnya dukungan pemerintah dalam menghubungkan UMKM dengan pasar global atau jaringan distribusi yang lebih luas sehingga hal ini membuat UMKM terjebak dalam pasar yang terbatas dan tidak dapat berkembang pesat meskipun produknya berkualitas (Wulansari et al., 2021).

Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah memiliki peluang besar dalam pemberdayaan UMKM. Berdasarkan data pemerintah kota semarang pada tahun 2024 terdapat 17.603 jumlah pelaku UMKM dengan skala mikro 16.485, skala kecil 1097, skala menengah 21 yang bergerak di berbagai sektor seperti perdagangan, jasa, manufaktur dan pertanian. Terdapat 585 jumlah pelaku UMKM di kecamatan Gunungpati yang terbagi menjadi 16 kelurahan salah satunya Kelurahan Kandri dengan jumlah UMKM 60 yang bergerak di berbagai sektor.

Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang berjarak 14 kilometer dari pusat kota. Kelurahan Kandri menjadi salah satu desa wisata unggulan di Kota Semarang. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Semarang No. 556/407, Desa Wisata Kandri telah diakui oleh Kota Semarang sejak tahun 2012. Desa ini merupakan destinasi wisata yang lengkap, menawarkan wisata alam serta wisata buatan lainnya (Fajrin, n.d.). Dengan adanya Desa Wisata menjadikan UMKM di kelurahan kandri bergerak aktif namun demikian, masih terdapat kendala dalam

pemberdayaan UMKM di kelurahan kandri. Kurangnya perhatian lebih dari pemerintah terhadap UMKM yang masih sebatas pelatihan tanpa adanya keberlanjutan dari program pelatihan tersebut, sehingga membuat pelaku UMKM di kelurahan kandri masih kesulitan dalam memasarkan produk UMKM. Kondisi UMKM di Kelurahan Kandri masih terdapat kesenjangan. Berdasarkan informasi yang dilansir dari media elektronik menyatakan bahwa UMKM di Kelurahan Kandri menyumbang sekitar separuh perekonomian namun UMKM belum sepenuhnya masuk ke dalam rantai perdagangan industri besar, sehingga membuat pertumbuhan UMKM tidak pesat. Mayoritas pemilik UMKM di Kelurahan Kandri masih menghadapi kendala rendahnya kesadaran masyarakat terhadap teknologi yang ada serta sulitnya pemasaran produk.

Penelitian sebelumnya yang membahas peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM, sebagian besar studi berfokus pada kota besar atau wilayah yang lebih maju secara ekonomi. Belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di daerah semi-urban seperti Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Selain itu, efektivitas program-program yang telah dijalankan di wilayah ini belum dievaluasi secara menyeluruh, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melihat peran pemerintah dan tantangan yang dihadapi UMKM.

Melihat peran UMKM yang sangat membantu dalam perekonomian daerah, maka peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengembangan UMKM perlu dilakukan agar daerah dapat tumbuh berkembang. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti mengangkat judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti mencoba merancang penelitiannya dan berfokus pada peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kota Semarang. Maka penulis membuat rumusan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana program pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kota Semarang.
2. Bagaimana faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di Kelurahan Kandri kota Semarang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk Mengetahui program pemerintah kota dalam pemberdayaan UMKM di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam melaksanakan program yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam memberdayakan UMKM di Kelurahan Kandri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis:

- a. Penelitian ini dapat menyediakan sumber materi baru untuk penelitian lain dalam objek yang sama..
- b. Penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam menyajikan informasi ilmiah di bidang politik mengenai peran pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM tepatnya di Kota Semarang.
- c. Penelitian ini dapat menyajikan sebuah informasi baru untuk penulis dan pembaca, baik dalam kalangan akademik maupun non-akademik dalam bidang politik khususnya tentang peran pemerintah dan UMKM.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang akurat dan terpercaya. Sehingga dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti selanjutnya dalam memahami lebih dalam tentang bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kota Semarang.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan baru baik bagi penulis, pembaca, maupun masyarakat umum tentang peran pemerintah daerah dalam memberdayakan UMKM di Kota Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah menggali informasi dari beberapa penelitian sebelumnya atau biasa disebut dengan *literatur review* sebagai bahan perbandingan dalam penelitian, berikut beberapa hasil dari *literatur review* tentunya sesuai dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang peran pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM di Kota Semarang.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Oleh Christofer Ondang, Frans Singkoh dan Neni Kumayas yang berjudul “*Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Minahasa (studi kasus di Dinas Koperasi Dan UMKM)*”. Studi ini mengeksplorasi bagaimana pemerintah daerah di Kabupaten Minahasa memberdayakan UMKM dengan menggunakan teknik deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pemerintah daerah memainkan peran kunci dalam menciptakan iklim yang mendukung bagi UMKM. Namun, belum semua kebijakan yang diterapkan mendukung pengembangan UMKM secara optimal. Terdapat kebutuhan untuk kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam menyediakan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pelaku UMKM agar dapat beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan yang kompetitif (Ondang et al., 2019)

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Herkulana dan Jurnadi Budiman yang berjudul *“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Umkm Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia”* Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada wawancara dan observasi, Penelitian ini menyebutkan berbagai kendala yang dihadapi pelaku UMKM, seperti keterbatasan teknologi dan kesulitan dalam pemasaran, tetapi tidak mendalami solusi spesifik yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini lebih fokus pada langkah-langkah pemberdayaan yang diambil oleh pemerintah daerah, tetapi tidak membahas secara mendalam tentang evaluasi dari kebijakan tersebut terhadap keberlanjutan UMKM dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.(Budiman, n.d, 2022.)

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Putu Ayu Sita Laksmi dan I Gede Wedana Laksmi yang berjudul *“Peran Pemerintah dan Modal Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha”* Untuk menguji data dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menggabungkan metodologi campuran dengan teknik studi literatur. Hasil dari penelitian tersebut menggambarkan kesejahteraan pelaku usaha dipengaruhi oleh peran aktif pemerintah dan kekuatan modal sosial. Pemberdayaan yang efektif melalui kebijakan yang mendukung dan penguatan jaringan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan komunitas secara keseluruhan. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mencapai tujuan kesejahteraan yang berkelanjutan (Laksmi & Arjawa, 2023)

Keempat, Itsnaini Rahmah dalam penelitiannya yang berjudul *“Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM.* Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengambil data melalui kuesioner untuk memastikan responden yang terpilih relevan dengan penelitian. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa teknologi, modal, dan lokasi perusahaan semuanya berdampak positif pada tingkat pendapatan UMKM. Namun, intervensi pemerintah hanya terbatas pada

mengurangi dampak modal terhadap pendapatan; intervensi tersebut tidak dapat mengurangi dampak teknologi dan lokasi perusahaan, sehingga pada penelitian ini menekankan pentingnya peran pemerintah terhadap pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan UMKM (Rahmah et al., 2020).

Kelima, dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aprian Jaelani dan Nurul Fidaris *“Evaluasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM di Kota Mataram”* Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang bertujuan untuk memastikan aktualitas data yang digunakan. Penelitian ini menegaskan bahwa UMKM dapat menjadi pendorong utama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, ketidaksesuaian antara potensi ini dan implementasi program pemberdayaan UMKM oleh pemerintah daerah seringkali menjadi hambatan dalam mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan, peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator harus dioptimalkan melalui kebijakan yang mendukung dan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat (Jaelani & Fidaris, 2024).

Dari hasil *literature review* yang telah dilakukan peneliti, fokus utama pada penelitian adalah keterlibatan peran pemerintah dan pihak terkait dalam pemberdayaan UMKM, meskipun beberapa peneliti sebelumnya sudah membahas peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM. Namun, hanya sedikit penelitian yang membahas secara terperinci dan masih terdapat ruang penelitian yang perlu dilakukan agar lebih spesifik mengenai peran Pemerintah Daerah dalam memberdayakan UMKM di Kota Semarang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah penerapan teknik atau cara ilmiah untuk mengumpulkan informasi tentang suatu objek guna memecahkan suatu masalah (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan metodologi yang meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*), dimana penulis akan melihat secara langsung permasalahan yang muncul di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif fokusnya terletak pada ketetapan dan kecukupan data, yang mengacu pada kesesuaian antara informasi yang dikumpulkan dengan latar belakang sebenarnya yang diteliti. Tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk Mengetahui fenomena yang dialami oleh partisipan penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan sebagainya. Hal ini dicapai melalui penggunaan deskripsi kata-kata dalam suatu latar alamiah dan berbagai pendekatan alamiah. Memahami fenomena atau gejala sosial yang lebih berkonsentrasi pada gambaran keseluruhan dari masalah dengan subjek adalah tujuan utama penelitian kualitatif (Adlini et al., 2022).

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang digunakan oleh penulis merupakan metode yang menitikberatkan pada pendeskripsian data atau fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu dalam penyajiannya penulis menyajikan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi kata bukan dalam bentuk angka atau statistik. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data secara langsung atau sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, serta informasi yang didapatkan langsung terhadap informan yang menjadi subjek penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian lapangan, sebagai bagian dari proses penelitian dilakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara data yang didapat sebagai hasil studi. Pustaka ditampilkan sebagai temuan penelitian diabstraksikan untuk memberikan semua informasi yang relevan, dan dianalisis untuk menghasilkan pengetahuan untuk menarik kesimpulan (Darmalaksana, 2020).

Pada penelitian ini penulis akan memaparkan dan menganalisis permasalahan terkait Peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM di Kota Semarang. Menggunakan pendekatan deskriptif dengan studi kasus dengan demikian penulis akan terjun langsung untuk penelitian yang menjadi lokasi yaitu di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yaitu segala sesuatu yang menyediakan data atau informasi. Data primer dan sekunder adalah dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Sementara data sekunder dikumpulkan dari buku-buku atau publikasi lainnya, data primer dikumpulkan melalui prosedur seperti observasi dan wawancara.

a. Data Primer

Data primer berasal langsung dari sumber aslinya dan dikumpulkan oleh peneliti untuk penelitian. Informasi ini dikumpulkan langsung dari topik atau objek penelitian, maka informasi ini sangat akurat dan relevan dengan masalah yang diteliti (Ibrahim, 2023). Dalam mengumpulkan data primer bisa dilakukan berbagai teknik termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data yang akan diperoleh penulis dalam wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan kepada pihak-pihak terkait, baik akademisi, dan politisi. Wawancara mendalam dilakukan dengan Pemerintah (Dinas koperasi dan perangkat kelurahan kandri), dan pelaku UMKM di Kelurahan Kandri, Sebagaimana pandangan informan mengenai fenomena yang terjadi tentang peran pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM di Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data pelengkap yang telah diolah dan disebarluaskan oleh pihak lain dikenal sebagai data sekunder. Informasi yang dikumpulkan dari buku, jurnal, dan makalah penelitian, di antara sumber-sumber lain yang dipublikasikan. Manfaat utama menggunakan data sekunder adalah menghemat uang dan waktu peneliti dengan meniadakan persyaratan pengumpulan data awal (Sekaran & Roger, 2016). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan catatan sumber terkait untuk memperkuat analisis peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kelurahan Gunungpati, Kota Semarang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akan diolah dan dianalisis (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk pengumpulan data. Teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat.

a. Observasi

Menurut (Sugiyono, 2017) observasi merupakan metode dengan ciri yang spesifik tidak seperti teknik pendekatan pengumpulan data lainnya, observasi tidak berpatokan terhadap orang tetapi dapat diperoleh juga dari objek alam lainnya. Melalui kegiatan observasi, peneliti dapat memperoleh pengetahuan tentang perilaku dan signifikansinya. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis akan mengamati lebih dalam terhadap sikap pemerintah terhadap pelaku UMKM di Kelurahan Kandri, Kota Semarang dan melihat bagaimana program pemerintah terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Semarang.

b. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Menurut (Sugiyono, 2017) Salah satu cara pengumpulan data untuk penelitian adalah melalui wawancara, yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi dari partisipan tentang. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk mengidentifikasi permasalahan secara lebih terbuka. dimana responden yang merupakan pedagang mikro dan kecil di Kelurahan Kandri dimintai pendapat, saran, atau terobosan baru dalam menangani permasalahan yang ada di lapangan. Pada penelitian ini informan yang akan diwawancarai yaitu pemerintah (Dinas koperasi dan perangkat kelurahan Kandri) pelaku UMKM di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2017) Dokumentasi merupakan suatu pengamatan aktual yang dilakukan guna mengumpulkan informasi yang

relevan terhadap pokok bahasan yang sedang dibahas. Hal ini dilakukan agar mengetahui gambaran nyata yang terjadi dilapangan. Teknik dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen tekstual, visual, dan elektronik yang dapat memasok data yang diperlukan untuk studi (Arikunto, 2010).

Dalam melakukan penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari arsip dokumen, dan terbitan lain yang ada kaitannya dengan pokok bahasan penelitian, yakni tentang peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Penulis akan menggunakan data tersebut untuk melengkapi data dan sebagai data pelengkap data utama yang diperoleh dari hasil Observasi dan wawancara mendalam.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mempelajari dan mengolah data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pemilihan data yang akan dipelajari berdasarkan kebutuhan penelitian, menyingkirkan data yang tidak diperlukan, dan menarik kesimpulan yang akan memudahkan pembaca secara umum dan bagi mereka sendiri secara khusus (Qomari, 2009).

Metode induktif diterapkan dalam penelitian ini. Metode induktif yaitu melakukan kajian terhadap data yang sudah didapatkan melalui teknik pengumpulan data, data dikumpulkan menjadi satu dan dilakukan analisis, dan dirangkai menjadi satu kesatuan, lalu dilakukan penulisan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian. Penulis menggunakan metode induktif untuk mengolah data melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses analisis yang dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, mengkategorikan, dan menyederhanakan data, penulis akan melakukan hal ini agar hasil penelitian dapat mudah dipahami (Bungin, 2011).

b. Penyajian Data

selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Dalam penelitian ini, data disajikan secara naratif untuk membantu peneliti memahami dan menyimpulkan data yang didapatkan (Rijali, 2019).

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan penulis akan memastikan hasil akhir dari analisis data yang telah dilakukan dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab 1, penulis akan menyajikan terkait dengan latar belakang permasalahan pada penelitian yang mencakup rumusan masalah yang kemudian dijelaskan terkait tujuan dan manfaat dari penelitian. Selain itu pada bab ini akan menjelaskan terkait dengan pendekatan serta metode yang digunakan dalam penelitian.

BAB II PEMERINTAH DAERAH DAN PEMBERDAYAAN UMKM, TEORI PEMBERDAYAAN

Dalam bab ini, Penulis menjelaskan teori yang digunakan dengan topik penelitian. Penulis menjelaskan tentang Pemerintah Daerah, pemberdayaan UMKM, dan konsep teori pemberdayaan dari Jim Ife secara menyeluruh.

BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN KANDRI

Dalam bab III, peneliti menjelaskan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, seperti profil Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang dan Asosiasi UMKM Mekarsari.

BAB IV PROGRAM PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA SEMARANG

Pada bab IV penulis akan menjelaskan terkait hasil analisis terkait program yang digunakan pemerintah dalam memberdayakan UMKM di Kota Semarang.

BAB V FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM DI KELURAHAN KANDRI KOTA SEMARANG

Pada bab ini, penulis menjelaskan terkait faktor penghambat yang dialami pemerintah dalam melaksanakan program untuk memberdayakan UMKM di Kelurahan Kandri Kota Semarang.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini penuliskan akan menyajikan hasil penelitian secara menyeluruh mengenai permasalahan dalam penelitian guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah serta akan memberikan saran terkait dengan permasalahan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bab ini berisi rujukan atau acuan yang menjadi sumber penulis dalam melakukan penyusunan penulisan dalam melakukan penelitian.

BAB II

PEMERINTAH DAERAH DAN PEMBERDAYAAN UMKM

A. Konsep Peran Pemerintah Daerah

1. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan terjemahan dari istilah *local government* yang memiliki tiga makna utama yaitu pemerintah daerah, pemerintahan daerah, dan daerah otonom (Djaenur & Enceng, 2012). Pemerintah daerah yaitu Suatu organisasi, badan, atau lembaga yang mengelola administrasi suatu daerah. Dalam konteks ini kepala daerah dan perwakilan rakyat daerah di Indonesia. Kedua lembaga ini mengawasi pemerintahan lokal sehari-hari. Oleh karena itu kedua lembaga ini dimaknai sebagai pemerintah daerah (*local government* atau *local authority*). Dengan kata lain, pemerintah daerah berkaitan dengan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh administrasi pemerintah daerah. Pemerintah daerah melaksanakan langkah-langkah pengaturan dalam kerangka organisasi pemerintah daerah. Kegiatan ini, yang pada hakikatnya berperan untuk membuat kebijakan pemerintahan daerah yang menjadi landasan atau pedoman dalam menjalankan pemerintahan, sangatlah penting.

Pemerintahan daerah menjalankan tugas yang sama dengan cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dari pemerintah pusat. Cabang legislatif dan eksekutif dari pemerintah pada hakikatnya adalah satu-satunya cabang yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan pemerintah federal bertanggung jawab atas semua fungsi hukum. Fungsi legislatif yang dijalankan oleh pemerintah daerah pada hakikatnya adalah fungsi politik. Oleh karena itu, fungsi ini merupakan tanggung jawab parlementer daripada legislatif, dan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Badan yudikatif (Mahkamah Agung, Pengadilan

Tinggi Negeri, dan pengadilan yang lebih rendah) sementara itu menerapkan konsep yudikatif.

Menurut Iyas Yusuf (2014:05) Peran pemerintah dalam pemberdayaan adalah yang mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan masyarakat guna menumbuhkan kesejahteraan, bukan memaksakan kehendaknya kepada masyarakat. Penting bagi pemerintah untuk memainkan peran aktif dan komprehensif dalam mendorong pertumbuhan masyarakat. maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

a. Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arahan yang menyeimbangkan penyelenggara pembangunan melalui pembuatan peraturan. Dengan menjadi acuan dasar, pemerintah membimbing masyarakat dalam pengelolaan seluruh kegiatan pemberdayaan.

b. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan, secara efektif menjembatani berbagai kepentingan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan daerah. Dalam kapasitas ini, pemerintah memberikan dukungan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan, serta menawarkan bantuan keuangan untuk memberdayakan masyarakat dengan modal yang diperlukan untuk pemberdayaan.

c. Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi hambatan dalam proses pembangunan untuk mendorong dan menjaga dinamika

pembangunan daerah. Pemerintah berperan dengan memberikan insentif dan bimbingan serta arahan yang efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh atau badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah merupakan komponen kunci dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia, pemerintahan daerah mengacu pada kewenangan administratif yang beroperasi di wilayah yang lebih kecil dari suatu negara Indonesia. Wilayah negara terbagi menjadi provinsi-provinsi, yang kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota dipimpin oleh suatu perangkat daerah yang semuanya dibentuk dan diatur dengan undang-undang.

2. Peran Pemerintah Dalam Islam

Dalam pemerintahan, seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Sebagaimana dalam kaidah fikih yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijaksanaan imam mengacu kepada kemaslahatan rakyat”.

Kaidah ayat tersebut menekankan bahwa kebijakan seorang imam (pemimpin) hendaknya mengacu pada kemaslahatan rakyat (kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat). Menurut ajaran Islam, pemimpin sejati adalah orang yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar kepemimpinan. Di dalam islam sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam memimpin yakni:

a. Tanggung jawab pemimpin

Pemerintah mengemban amanah Allah untuk menunaikan tugas-tugas kolektif baik di bidang sosial maupun politik. Dalam upaya ini, seorang pemimpin memikul tanggung jawab mendasar kepada rakyatnya. Sebagaimana terdapat dalam Al-qur‘an yang berbunyi

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (Q.S Al-muddassir [74] : 38)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada hari kiamat, setiap individu akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Meskipun prinsip-prinsip umum sering kali menyertakan pengecualian, dalam konteks ini pengecualian berlaku bagi mereka yang termasuk dalam kelompok shaleh yang disebut ashabul yamin. Mengenai mereka yang termasuk dalam kelompok “ashabal yamin” yakni, orang-orang yang beriman termasuk orang-orang yang menepati janji Nabi Adam a.s, mereka yang mengikuti ajaran yang terdapat dalam kitab suci yang mereka imani, tanpa mengaitkannya dengan dosa, para malaikat, dan keluguan anak muslim.”

b. Keadilan

Keadilan adalah kualitas mendasar bagi setiap pemimpin, karena keadilan berdampak langsung pada kesejahteraan komunitasnya. Seorang pemimpin sejati mempunyai tanggung jawab untuk memastikan persamaan hak bagi semua orang, dan hal ini hanya dapat dicapai melalui keadilan dan kesetaraan. Dalam Islam ditegaskan bahwa seorang pemimpin harus memperlakukan semua individu tanpa diskriminasi, dengan mewujudkan prinsip keadilan dalam tindakannya terhadap setiap anggota masyarakat.

Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.(QS. An-Nahl [16] : 90)

Sebagaimana dijelaskan dalam surat diatas, ada tiga prinsip penting yang diperintahkan Allah SWT untuk kita jalankan secara konsisten sebagai wujud ketaatan kita. Pertama, kita dipanggil untuk bertindak adil. Hal ini mencakup pertimbangan yang adil, menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar, memastikan bahwa setiap orang menerima haknya, dan menahan diri dari segala bentuk ketidakadilan atau perlakuan buruk. Kedua, kita dianjurkan untuk melakukan perbuatan baik. Hal ini mencakup dua aspek utama: meningkatkan kualitas tindakan kita untuk memperkuat iman kita, dan memperluas kebaikan kita kepada orang lain dengan cara yang melebihi keadilan. Ketiga, memberikan dukungan kepada anggota keluarga terdekat merupakan contoh semangat ihsan yang berkelanjutan.

c. Kemandirian

Seorang pemimpin harus membuat program yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang ada, memberdayakan anggota masyarakat untuk mengelola usahanya secara mandiri. Allah berfirman:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيْهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ قَالِقِيْهِ فِي الْبَيْمِ وَلَا تَخَافِيْ

وَلَا تَحْزَنِيْ إِنَّا رَادُّوْهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

Artinya: “Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul”. (QS.Al-Qashash [28] : 7)

Surat di atas menjelaskan bahwa kewajiban setiap Muslim dan tentu saja, setiap manusia untuk berusaha dengan tekun, dalam batasan yang ditetapkan oleh Allah, untuk memperoleh kekayaan. Seseorang harus sungguh-sungguh mencari dan memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya yang telah Allah sediakan. Hal ini berakar pada pemahaman bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri untuk mengubahnya sendiri. Lebih jauh lagi, seperti telah disoroti sebelumnya, prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu pemerintah juga bertanggung jawab dalam memainkan peran penting untuk mencapai tujuan ekonomi Islam secara menyeluruh.

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Pengertian UMKM

Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur dalam pasal 1 UU No.20 Tahun 2008. Menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha. Usaha-usaha tersebut dapat berupa

anak perusahaan atau bukan anak perusahaan, dan dapat dimiliki, dikendalikan, atau bukan anak cabang perusahaan secara langsung maupun tidak langsung dengan suatu perusahaan menengah atau besar, yang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan usaha yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

UMKM merupakan sumber utama pengembangan lapangan kerja di beberapa negara. Karena intensitas tenaga kerja mereka yang seringkali lebih tinggi, UMKM berperan dalam mengurangi kesulitan sosial ekonomi dan pengangguran. Menurut *International Finance Corporation* (IFC), UMKM menyediakan 70% hingga 95% dari seluruh lapangan kerja di banyak negara. UMKM meningkatkan output dan pendapatan lokal, yang memajukan ekonomi lokal. Ketika UMKM terlibat dalam rantai pasokan industri terkait, termasuk bahan baku, logistik, dan sektor jasa, hal ini menciptakan dampak yang berlipat ganda. UMKM memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. UMKM seringkali menggunakan sumber daya dan bahan baku lokal. Dalam partisipasi mereka dalam rantai pasokan regional UMKM membantu meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat lokal dengan terlibat dalam kegiatan Produksi dan penjualan. Selain itu, pemilik UMKM menginvestasikan kembali uangnya ke masyarakat, sehingga memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) dan mendorong pertumbuhan usaha lainnya (Vinatra, 2023).

Sehingga Definisi UMKM adalah usaha yang bergerak di bidang usaha yang memainkan peranan penting terhadap

masyarakat, dikarenakan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

2. Kriteria UMKM

Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 35 PP UMKM NO. 7/2021, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diklasifikasikan berdasarkan kriteria terkait modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Modal mencakup dana pribadi dan modal pinjaman yang digunakan untuk menjalankan operasi bisnis. Kriteria modal usaha terdiri atas:

- a. Usaha mikro mempunyai modal tidak lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha kecil mempunyai modal lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Usaha Menengah mempunyai modal lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.

3. Jenis - Jenis UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan merupakan jenis usaha yang paling banyak jumlahnya. Selain itu, sektor ini telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa dalam menahan dampak buruk krisis ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendukung kelompok UMKM yang mencakup beragam kelompok. Berikut ini gambaran mengenai kategorisasi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Menurut Suci (2017). UMKM dapat memainkan peran penting dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia karena berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Dalam PP UMKM NO.7/2021 Pasal 1 menjelaskan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah dibagi menjadi beberapa pengertian yakni:

- a. Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha tunggal yang memenuhi kriteria usaha mikro yang ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah.
- b. Usaha kecil adalah usaha yang dioperasikan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan besar. Usaha-usaha ini berdiri sendiri, dan mematuhi peraturan pemerintah.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan usaha besar yang memenuhi usaha menengah sesuai dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah.
- d. Usaha menengah adalah usaha ekonomi sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan besar yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian secara langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau besar. Yang memenuhi kriteria usaha menengah sesuai dengan yang dituangkan dalam peraturan pemerintah.

4. Peran UMKM dalam perekonomian

UMKM berperan penting dalam mendorong kemajuan perekonomian, khususnya di Indonesia. UMKM mampu mandiri

dalam suatu kegiatan ekonomi menunjukkan kemampuan mereka untuk beroperasi secara mandiri tanpa bergantung pada dukungan orang lain dengan memanfaatkan modal dan teknologi yang mereka miliki, UMKM tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap perekonomian tetapi juga memposisikan diri untuk bersaing secara efektif dengan pengusaha lain di pasar (Arliman S, 2017) . Berikut 2 peranan UMKM di Indonesia:

a. Membuka peluang kerja atau lapangan kerja

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. UMKM mampu berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja.

b. Meningkatkan Pendapatan

UMKM memberikan peluang kerja bagi masyarakat, baik sebagai pemilik usaha maupun pekerja dengan adanya usaha ini Pemilik usaha mendapatkan keuntungan dari penjualan produk atau jasa. Pekerja menerima upah atau gaji yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka. UMKM memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, mendukung UMKM melalui kebijakan, pelatihan, dan akses pembiayaan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan kontribusi ini.

C. Pemberdayaan UMKM

1. Definisi Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan dan pemerkuasaan berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). pemberdayaan sebagai proses perubahan yang kemudian memiliki relevansi. Dengan kata lain, dua faktor sebenarnya diperlukan agar proses pemberdayaan dapat terjadi pertama, kekuasaan dapat berubah,

Pemberdayaan tidak mungkin terjadi jika kekuasaan tidak berubah. (Kedua) kekuatan yang lebih besar, hal ini menekankan bahwa kekuasaan bersifat dinamis dan bukan statis (Hidayat, 2023) (Hidayat, 2023)

Pemberdayaan menekankan bahwa orang dapat memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan kekuasaan yang diperlukan untuk mempengaruhi kehidupan mereka sendiri maupun kehidupan orang lain. Pemberdayaan adalah suatu proses yang berupaya untuk memberikan setiap orang kekuasaan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengendalian dan pengaruh. Pemberdayaan dapat dipahami sebagai suatu proses dalam suatu kegiatan yang berupaya untuk meningkatkan kekuasaan atau pemberdayaan kelompok yang lemah atau rentan dalam masyarakat, seperti orang-orang yang berjuang dengan masalah terkait kemiskinan di tingkat ekonomi (Roesmidi & Risyanti, 2006).

Dalam penjelasan di atas dikatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu kekuasaan yang berarti kekuatan, berdaya artinya mempunyai kekuasaan. Namun dalam perkembangannya dari berbagai referensi dan bidang menunjukkan keberagaman pemahaman makna pemberdayaan itu. pemberdayaan adalah proses pemberdayaan masyarakat yang menekankan bahwa seseorang harus memperoleh berbagai hak agar dapat diberdayakan untuk berpartisipasi dalam kehidupan, misalnya keterampilan, pengetahuan, kekuasaan yang cukup. Oleh karena itu, hak-hak yang berbeda harus diberikan, kewenangan yang diwujudkan tersebut selain berdampak pada kehidupannya, juga dapat berdampak pada kehidupan pemangku kepentingan lainnya (Rabiah et al., 2022).

Pemerintah daerah dapat mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberdayaan. Dalam pengembangan UMKM, pemberdayaan mengacu pada pemberian

wewenang atau keterampilan terkait dengan pengetahuan, penguatan modal terhadap sumber daya manusia, dan perlindungan barang. Mengangkat dan membina masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat mengembangkan potensi dan kapasitas yang dimiliki setiap daerah (Wulansari et al., 2021).

Proses pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bertujuan untuk memberi kapasitas dan kemampuan tambahan sehingga dapat tumbuh lebih berkelanjutan dan efektif. Hal ini merupakan salah satu langkah pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan mencapai pemerataan ekonomi. Salah satu strategi pemerintah saat ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha kecil, mengingat peran UMKM yang masih terbatas dalam potensinya untuk pengembangan UMKM (Andiny & Nurjannah, 2018).

2. Prinsip Pemberdayaan UMKM

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 4 prinsip pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan

- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu

Tujuan pemberdayaan adalah untuk menguatkan kekuatan masyarakat khususnya bagi kelompok masyarakat kurang beruntung yang memiliki keterbatasan baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Karena pemberdayaan berkaitan dengan keterampilan seseorang, khususnya bagi masyarakat yang lemah dan tidak berdaya, maka penting untuk mengenali kelompok masyarakat mana yang lemah dan merasakan ketidakberdayaan (Firman, 2021).

3. Pemberdayaan dalam perspektif Islam

Pemberdayaan menurut Islam adalah sebuah tindakan yang merekomendasikan solusi alternatif dalam memecahkan permasalahan ummah dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam. Pemberdayaan sudah ada sejak dahulu dalam Islam yang telah dipelopori oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dimana pemberdayaan tersebut mengarah pada perubahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menanamkan kemandirian pada diri masyarakat yang diberdayakan (Luthfi, 2024).

Menurut Islam pemberdayaan adalah proses yang menyarankan pendekatan alternatif untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi umat dalam perspektif Islam. Pemberdayaan dalam islam telah lama dipraktikkan dan pertama kali diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberikan rasa kemandirian pada individu yang berdaya. Sebagaimana dalam firman Allah:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مَن أَمَرَ اللَّهُ ط أَنْ لَا يُغَيِّرَ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعْزِرُوا مَا
بِأَنفُسِهِمْ ط وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِّنْ وَّالٍ ۝ ١١ (الرَّعَد/13: 11)

Artinya: “Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia (Ar-Ra'd/13:11). Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka mengubah keadaannya sendiri.

Ayat ini juga mendorong jiwa seseorang untuk mandiri, Tujuan pemberdayaan adalah untuk memungkinkan individu atau kelompok mampu mengubah kehidupan mereka sendiri dan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Pemberdayaan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menggunakan strategi dalam upayanya mengatasi kemiskinan. Rasulullah tidak memberikan bantuan langsung dan bersifat sementara kepada umatnya untuk keluar dari kemiskinan. Tetapi Rasulullah memberi mereka bimbingan dan nasihat serta mendorong mereka untuk terus berusaha sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri dan menyelesaikan persoalan menggunakan kemampuan mereka sendiri. Dengan demikian pemberdayaan merupakan suatu proses dan tujuan. Proses pemberdayaan mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan masyarakat marginal, khususnya mereka yang terkena dampak kemiskinan (Krisna, 2016).

D. Teori Pemberdayaan Jim Ife

Menurut (Jim Ife, 2008), Pemberdayaan adalah proses memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat, agar mereka lebih mandiri dalam menentukan masa depan, dan berpartisipasi dalam kehidupan kelompoknya. Dalam bukunya yang berjudul *Community Development, community-based alternatives in an Age*

of Globalisation (2008) menjelaskan pemberdayaan (*empowerment*) adalah sentral bagi suatu keadilan sosial dan HAM, Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dari mereka yang dirugikan (*the disadvantaged*). Pernyataan ini mengandung dua konsep penting yaitu “*keberdayaan*” dan “*yang-dirugikan*”, yang masing-masing dari konsep tersebut perlu dipertimbangkan dalam setiap pembahasan mengenai pemberdayaan sebagai bagian dari suatu perspektif keadilan sosial dan HAM.

Menurut (Clegg 1989) dalam Jim ife (2008), menjelaskan bahwa pemberdayaan tidak lepas dari kekuasaan suatu individu atau kelompok yang mempunyai atau menggunakan kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan dan mendistribusikan kekuasaan dari kelompok ‘berdaya’ dan tidak berdaya’. Pengertian kekuasaan merupakan suatu konsep yang kompleks dan sering diperdebatkan, Para ahli sosial dan politik telah mengajukan berbagai definisi dan perspektif yang beragam mengenai kekuasaan.

1. Perspektif politik kekuasaan dalam teori jim ife

Terdapat empat kategori perspektif setiap kategori terdapat perbedaan perspektif dalam proses pemberdayaan (Jim Ife, 2008).

- a. Perspektif Pluralis, Perspektif ini berfokus pada peningkatan kapasitas individu atau kelompok agar mereka dapat bersaing dengan kepentingan lain di masyarakat, sehingga memungkinkan partisipasi yang aktif dan efektif dalam ranah sosial, ekonomi, dan politik. Pemberdayaan ini diwujudkan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan, termasuk teknik lobi, pemahaman sistem yang berlaku, dan penggunaan media sebagai alat pengaruh.
- b. Perspektif Elite pemberdayaan sebagai suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi kalangan elite, seperti pemuka masyarakat, pejabat, dan orang kaya. Dalam konteks ini, masyarakat sering kali menjadi tidak berdaya karena adanya kekuasaan dan kontrol yang kuat dari para elite terhadap berbagai aspek kehidupan,

termasuk media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi, dan parlemen

- c. Perspektif Struktural memandang Pemberdayaan bukan sekadar meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga tentang mengubah struktur masyarakat yang tidak adil. Ini adalah perjuangan yang lebih luas untuk menciptakan kesetaraan.
- d. Perspektif Post-Struktural adalah Pemberdayaan tidak hanya tentang aksi praktis, tetapi juga tentang mengembangkan pemikiran analitis yang memungkinkan individu dan kelompok memahami situasi mereka secara mendalam. Proses ini harus berkelanjutan, dengan dialog terbuka untuk bertukar ide baru. Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya jangka panjang untuk memperkuat kapasitas intelektual masyarakat.

2. Jenis- jenis kekuasaan dalam teori Jim Ife

Dalam teori Jim Ife terdapat jenis-jenis kekuasaan untuk pemberdayaan (Jim Ife, 2008).

- a. Kekuasaan atas pilihan pribadi, memberikan keleluasaan kepada setiap orang untuk menentukan pilihan hidupnya dan mendapatkan kesempatan yang sama, sehingga mereka mampu mengendalikan arah hidupnya dan berperan aktif dalam perubahan sosial.
- b. Kekuasaan untuk mempertahankan HAM, untuk melindungi HAM masyarakat perlu diberdayakan agar memiliki kekuatan. Pemberdayaan ini dilakukan melalui pendidikan, pengorganisasian komunitas, dan partisipasi politik.
- c. Kekuasaan atas definisi kebutuhan, pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan agar program dan kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata kehidupan mereka.
- d. Kekuasaan atas gagasan, kemampuan seseorang atau kelompok untuk memiliki kontrol atas pemikiran dan ekspresi mereka, tanpa dipengaruhi oleh tekanan dari pihak lain.

- e. Kekuasaan atas Lembaga-lembaga, dalam Jim Ife menekankan bahwa pemberdayaan melibatkan pemberian akses dan kesempatan partisipasi kepada individu dan kelompok dalam lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk mempengaruhi kebijakan dan memperoleh kontrol yang lebih besar atas kehidupan mereka, serta berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil.
- f. Kekuasaan atas sumber daya, merupakan proses pemberdayaan yang memungkinkan individu dan kelompok untuk mengakses, mengontrol, dan memanfaatkan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan memberikan akses yang lebih baik, pendidikan, advokasi kebijakan, dan membangun jaringan dukungan, diharapkan masyarakat dapat memperoleh kontrol lebih besar atas kehidupan mereka serta berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih lebih baik.
- g. Kekuasaan atas kegiatan ekonomi, negara memiliki tanggung jawab penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan ekonomi pada kelompok tertentu. Negara perlu menerapkan kebijakan yang mendukung pemerataan kekayaan dan kesempatan. Penting untuk disadari bahwa kekuasaan ekonomi sering kali tidak terbagi rata, dan ketidaksetaraan ini harus diatasi melalui kebijakan yang mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- h. Kekuasaan atas reproduksi, kekuasaan atas reproduksi melibatkan pengaturan siapa yang berhak memutuskan mengenai peran individu dalam reproduksi sosial. Hal ini terkait dengan bagaimana sumber daya, seperti akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesempatan ekonomi, disalurkan kepada individu. Masyarakat yang memiliki ketimpangan dalam kontrol atas sumber daya akan menciptakan kondisi di mana reproduksi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi terus berlanjut dari generasi ke generasi.

3. Strategi Pemberdayaan Jim Ife

Menurut (Jim Ife, 2008) Dalam upayanya memberdayakan masyarakat, Jim Ife menekankan pentingnya strategi sistematis untuk memperkuat individu atau kelompok yang kurang beruntung, menurut Jim Ife terdapat tiga strategi utama yang dapat digunakan dalam pemberdayaan yaitu:

- a. Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan, Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan merupakan strategi penting dalam teori Jim Ife, Ini mencakup upaya membangun lembaga yang inklusif, memperluas akses terhadap sumber daya, dan memastikan bahwa aspirasi masyarakat diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, diharapkan individu dan kelompok yang kurang beruntung dapat lebih berdaya dan berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil.
- b. Pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik, menurut Jim Ife pemberdayaan lewat aksi sosial dan politik adalah strategi untuk memperkuat partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menggerakkan massa, melakukan aksi politik, dan membentuk kekuatan kolektif, diharapkan individu dan kelompok yang dipinggirkan bisa mendapatkan kontrol yang lebih besar terhadap kehidupan mereka dan ikut andil dalam mewujudkan perubahan sosial yang lebih berkeadilan.
- c. Pemberdayaan melalui Pendidikan dan peningkatan kesadaran, Strategi ini menekankan pentingnya memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Melalui peningkatan kesadaran kritis, pelatihan yang relevan, dan pembangunan jaringan dukungan, diharapkan individu dan kelompok yang terpinggirkan dapat mengatasi ketidakberdayaan mereka dan berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih adil.

Teori pemberdayaan yang dijelaskan oleh Jim Ife, dalam penelitian ini yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM Kota Semarang” peneliti mengambil konsep Perspektif Pluralis, yang ditujukan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang selaku pemangku kekuasaan terhadap suatu Individu atau kelompok yang kurang berdaya hal ini ditujukan kepada pelaku UMKM di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

BAB III

LANDSCAPE KELURAHAN KANDRI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

A. Kelurahan Kandri

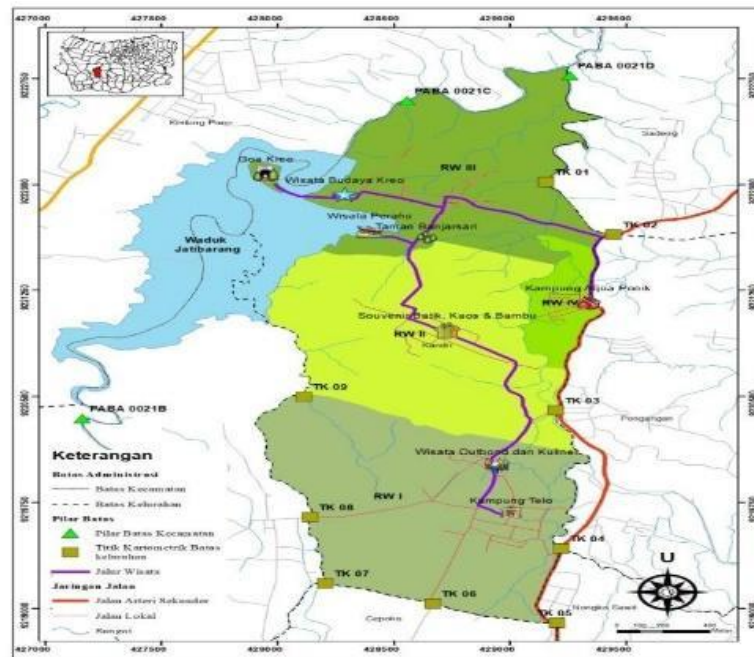
Secara administratif, Kelurahan kandri merupakan salah satu dari 16 kelurahan yang ada di kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Kandri termasuk wilayah pedesaan yang memiliki luas tanah sebagian besar masih berupa lahan pertanian dan perladangan. Masih terdapat banyak lahan kosong dan ruang terbuka hijau dengan jumlah tanaman yang sangat banyak. Luas lahan yang dapat ditanami pun masih sangat luas. Cadangan air juga mencukupi. Hal ini membuat Kelurahan Kandri asri, berhawa sejuk dan sangat mendukung terciptanya Kelurahan yang ramah lingkungan.

Kelurahan kandri saat ini dikenal sebagai Desa Wisata Kandri hal ini sudah ditetapkan oleh surat keputusan walikota No.556/407 Desember 2012, dengan cluster Desa Wisata Berbasis Daya Tarik Alam dan Daya Tarik Budaya. Saat ini, Kelurahan Kandri terus berkembang sebagai tujuan wisata unggulan di Semarang. Selain wisata alam, kelurahan ini juga mendukung kegiatan pendidikan lingkungan, pelestarian budaya, dan promosi produk lokal.

1. Kondisi Geografis

. Kelurahan Kandri, yang terletak di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, memiliki posisi astronomis yang berada di antara koordinat 110° 20' 20" Bujur Timur (BT) hingga 110° 24' 23" BT, serta 7° 0' 57" Lintang Selatan (LS) hingga 7° 6' 41" LS. Kedalaman air tanah rata-rata 80 – 90 dengan jenis tanah lempung pasir berkerikil. Kelurahan Kandri terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 259 mdpl dengan suhu min 27⁰ C dan mak 32⁰ C.

Gambar 1 Peta Kelurahan Kandri



Sumber: arsip dokumen Kelurahan Kandri

Kelurahan Kandri berada di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sadeng, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Cepoko, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Jatirejo, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Nongkosawit dan Pongangan. Kelurahan Kandri terletak di tempat yang sangat strategis, dikarenakan terdapat jalan alternatif penghubung antara Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang.

2. Kependudukan

Berdasarkan data yang di dapat dari monografi kelurahan Kandri pada tahun 2023, data kependudukan jumlah penduduk Kelurahan Kandri terdiri jumlah kependudukan dan jenis kelamin. Jumlah Kepala Keluarga Kelurahan Kandri terdapat 1.640 dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Jumlah penduduk Kelurahan Kandri Tahun 2023

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	2.574 Jiwa
Perempuan	2.501 Jiwa

Sumber: arsip dokumen kelurahan kandri

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Kandri terdapat 5.075 Jiwa yang berada di 4 RW dan 26 RT dan 1.415 KK. Pada tabel diatas terlihat jumlah penduduk laki-laki lebih dominan dari perempuan. Dalam kewarganegaraan Kelurahan Kandri seluruhnya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan berstatus agama islam.

3. Keagamaan

Berdasarkan data yang didapat dari monografi Kelurahan Kandri tahun 2023 menyatakan bahwa hampir semua warga masyarakatnya pemeluk agama Islam, dari total jumlah penduduk. Dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Data Penduduk berdasarkan Agama di Kelurahan Kandri tahun 2023

Penduduk Berdasarkan Agama	Jumlah
Islam	4.967
Katolik	32
Protestan	70
Hindu	5
Budha	1
Konghucu	0

Sumber : Arsip dokumen Kelurahan Kandri

Berdasarkan data diatas penduduk Kelurahan Kandri berdasarkan agama mayoritas beragama islam. kebanyakan merupakan warga asli berasal dari Kelurahan Kandri secara turun temurun. Hal inilah yang secara sosial mempengaruhi aktivitas kemasyarakatan yang

bernuansa budaya Islami di Kelurahan Kandri. Berdasarkan data monografi Kelurahan Kandri tahun 2023, terdapat jumlah tempat ibadah di Kelurahan Kandri dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Jumlah tempat ibadah di Kelurahan Kandri tahun 2023

Tempat Ibadah	Jumlah
Masjid	4
Mushola.	13
Gereja Protestan	0
Gereja Katolik	0
Kuil/Vihara	0
Pura	0
Klenteng	0

Sumber ; arsip dokumen Kelurahan Kandri

Berdasarkan jumlah data di atas dinyatakan bahwa jumlah tempat ibadah yang ada di Kelurahan Kandri paling banyak adalah jumlah tempat ibadah umat muslim yaitu mushola yang berjumlah 13 dan masjid yang berjumlah 3. Karena mayoritas penduduk di Kelurahan Kandri beragama Islam.

4. Kondisi Ekonomi

Berdasarkan mata pencaharian penduduk Kelurahan Kandri kebanyakan pada bidang wiraswasta sejumlah 350 orang dari total jumlah penduduk, diikuti dengan profesi sebagai pedagang sejumlah 293 orang

Tabel 3. 4 Data Penduduk Berdasarkan Pencaharian

Penduduk Menurut Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	124
Pedagang	293
PNS	77

TNI	12
Buruh Industri	350

Sumber :arsip dokumen Kelurahan Kandri 2023

Berdasarkan data tabel di atas disimpulkan bahwa pencaharian penduduk Kelurahan Kandri sebagai buruh industri dan pedagang. Hal ini disebabkan karena letak Kelurahan Kandri berdekatan dengan beberapa industri yang ada di Kota Semarang. Disusul dengan jumlah pedagang yang cukup tinggi dikarenakan Kelurahan Kandri merupakan desa wisata unggulan Kota Semarang sehingga warga memanfaatkan hal tersebut dengan membuat produk UMKM/ Pedagang.

5. Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk tingkat Pendidikan menurut data monografi Kelurahan Kandri tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Data Pendidikan	Jumlah
TK	;843
SD	468
SMP	670
SMA	1.216
PT	387

Sumber : arsip dokumen Kelurahan Kandri

Data menunjukan bahwa tingkat Pendidikan di Kelurahan Kandri sangat tinggi. Hal ini menunjukan masyarakat Kelurahan Kandri mengedepankan pentingnya pendidikan dengan adanya SD Negeri 2, Madrasah Ibtidaiyah/MI 1, TK/RA 3, Pos PAUD 1.

6. Pemerintahan

Dalam bidang pemerintahan Kelurahan Kandri telah sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang telah diundangkan pada Peraturan Walikota Semarang nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Kecamatan. Adapun Struktur Organisasi yang ada di Kelurahan Kandri yaitu :

Tabel 3. 6 Struktur Organisasi Kelurahan Kandri tahun 2023

Nama	Jabatan	Status
Mutmainah, SE	Lurah	PNS
Eldest Armyrianti Surono, S.STP	Sekretaris Kelurahan	PNS
Hardian Fitrianto, S.H.	Kasi Pembangunan	PNS
Agus Widodo	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	PNS
Gino	Pengadministrasi Umum	PNS
Tika Setyarini, A.Md	Pengelola Administrasi Pemerintahan	PNS
Maslakhatul Hidayah	Staf Pelayanan & Kebersihan	Non ASN
Salim	Staf Kebersihan	Non ASN
Septi Putrianti, WS, Amd.Kom	Staff IT	Non ASN

Sumber : arsip dokumen Kelurahan Kandri 2

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kelurahan Kandri mempunyai sarana prasarana seperti, Kantor kelurahan yang meliputi ruang lurah, ruang sekretariat, ruang kasi dan staf, ruang pelayanan, mushola, kamar mandi, dapur, balai kelurahan, ruang PKK, ruang FKK dan ruang laktasi, ruang LPMK, ruang arsip, pojok baca dan area bebas merokok, Perlengkapan kantor tersedia Komputer 5 Buah, Laptop 3 Buah, Printer 3 Buah. Alat transportasi kelurahan kandri tersedia sepeda motor dinas 3 Buah dan sepeda motor roda 3 berjumlah 1 Buah. Tenda UMKM 2 buah. Jaringan Listrik yang digunakan adalah jaringan listrik dari PLN Jaringan internet tersedia dari Pemerintah Kota Semarang.

B. Profil UMKM Mekarsari

UMKM Mekarsari merupakan sebuah wadah asosiasi yang berada di kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. UMKM Mekarsari Kandri didirikan pada Desember 2013, setahun setelah peresmian Desa Wisata Kandri. Asosiasi ini bertujuan untuk mendukung masyarakat dalam menjalankan usahanya. Hal ini terbukti dengan pesatnya perkembangan berbagai jenis usaha yang dikelola oleh masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku produksi juga dilakukan, yang tentunya menjadi ciri khas dari produk yang diperjualbelikan. Selain itu, adanya aneka jenis produk juga menciptakan daya tarik tersendiri bagi para konsumen. UMKM Mekarsari di Kelurahan Kandri merupakan contoh nyata bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat setempat.

Tabel 3. 7 Daftar UMKM Kelurahan Kandri

No	Nama Umkm	Jenis Usaha
1	Kampoeng Telo	Makanan Dari Ketela
2	Batik Siwarak	Batik
3	Lazal	
4	Omah Pohong	Makanan Dari Ketela
5	Mbak Ginuk	Aneka Kripik
6	The Ind	Aneka Stik, Kripik Tela
7	Valentika	Manisan Pepaya, Tomat
8	Shasa Snack & Catering	Bandeng Presto, Nugget
9	Puji Wijaya	Jely Art, Kripik
10	Muryati	Olahan Pangan
11	Eco Raos	Olahan Pangan
12	Sikela	Kripik Singkong
13	Imel Colection	Baju, Tas
14	Kripik Tempe Bu Agus	Kripik Tempe
15	Kandri Etnic	Souvenir
16	Nyak Dut	Bandeng Presto, Pepes
17	Kandrito	Olahan Susu, Aneka Es
18	Rumah Bihun	Bihun
19	Es Dawet Ayu	Dawet Ayu
20	Tamarilo Bakery	Roti
21	Tailor	Penjahit
22	Salon Merrizta	Salon
23	Dheva Kriuk Aneka Snack	Olahan Pangan
24	Catering Soni Snack	Catering, Snack
25	Mandiri Kreo	Dodol Tape
26	Griya Jajan	Aneka Jajanan
27	Snack Bu Imro'ah	Aneka Snack
28	Snack Bu Sulistyowati	Aneka Snack
29	Kripik Bu Farida	Kripik
30	Olahan Peyek Bu Purwanti	Olahan Peyek
31	Kripik Mbak Brind	Kripik
32	Tahu Bakso Pak Robert	Tahu Bakso
33	Rahma Snack	Aneka Snack
34	Berkah Kandri	Kelontong

35	Toko Bu Pur	Kelontong
36	Kue Samir Dan Gorengan	Kue Samir Dan Gorengan
37	Ringin Kandri Motor	Asesoris Motor
38	One Net	Warnet Game Ol
39	Warung Jihadi	Kelontong
40	Bayu Entertainment	Persewaan Sound Sistem
41	Toko Harum	Pembayaran Ol,Kelontong
42	Toko Jiharso	Kelontong
43	Damai Collection	Konveksi
44	Warung Makan Kamdi	Warung Makan
45	Bengkel Motor Dul Karim	Bengkel Motor
46	Vision	Jasa Shooting Video
47	Cukur Yudi	Tukang Cukur Madura
48	Jamur Tiram Agus	Budi Daya Jamur Tiram
49	Jamur Tiram Samsuri	Budi Daya Jamur Tiram
50	Jamur Tiram Mutofiah	Budi Daya Jamur Tiram
51	Jamur Tiram Samuji	Budi Daya Jamur Tiram
52	Bengkel Motor Puji	Bengkel Motor
53	Bengkel Cat Mobil Budi	Cat Mobil
54	Ternak Ayam Suyatni	Ternak Ayam Pedaging
55	Toko Dnd	Fotokopi Dan Alat Tulis
56	Cuci Motor Warsimin	Cuci Motor
57	Kios Solikin	Cuci Motor Dan Kios Bensin
58	Warung Makan Mudakir	Penyetan
59	Toko Ikhwani	Kelontong
60	Warung Satiya	Kelontong
61	Warung Chamim	Kelontong
62	Perabot Dirjo	Perabot Keliling

Sumber : Arsip Dokumen Kelurahan Kandri

Berdasarkan data diatas menjelaskan terdapat 62 pelaku UMKM dari berbagai jenis usaha, adanya Desa Wisata di Kelurahan Kandri membuat masyarakat setempat untuk bergerak di bidang usaha hal ini dikarenakan sumber daya alam yang memadai dan ramainya kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata.

BAB IV

PROGRAM PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA SEMARANG

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian berdasarkan dari permasalahan yang ada mengenai pemasaran UMKM di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Pada bab ini akan membahas mengenai, program pemerintah terhadap UMKM di Kota Semarang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendapatkan data langsung dari sumber yang ada di lapangan. Pemerintah terus berupaya dalam melakukan pemberdayaan terhadap UMKM, pemberdayaan dilakukan melalui berbagai program yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, sumber daya, atau dukungan yang diperlukan agar masyarakat dapat mengambil kendali atas kehidupan mereka, mengatasi tantangan, dan mencapai potensi maksimal mereka. Mengenai pemberdayaan UMKM berbagai peraturan daerah diciptakan untuk mempermudah prosedur perizinan serta pemberian izin usaha, sehingga UMKM lebih cepat berkembang.

Peran UMKM dalam perekonomian daerah tak lepas dari peran pemerintah daerah setempat dalam melakukan pemberdayaan terhadap UMKM. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk membuat kebijakan yang menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. Berdasarkan peraturan walikota Semarang No 66 Tahun 2022 tentang Jejaring kemitraan pada pasal 6 ayat 2 poin 1 yang berbunyi bentuk fasilitas berupa pendampingan, pelatihan, pemasaran dan permodalan.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh Ibu Anis selaku pengawas koperasi dan umkm Kota Semarang menyatakan bahwa.

“Dalam pengembangan UMKM sendiri kita ada yang namanya 4P (pendampingan, permodalan, pemasaran, pelatihan) yang dimana 4P itu termasuk ke dalam peraturan walikota No. 66 tahun 2022 tentang Jejaring Kemitraan Usaha Mikro, kebetulan untuk pemberdayaan usaha mikro itu masuk kedalam bidang tersebut dalam bentuk realisasi dari kebijakan tersebut kita fasilitasi dalam bentuk 4P tadi”. (wawancara dengan Ibu Anis 26 November 2024)

Data diatas menjelaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan program berupa pendampingan, pelatihan, pemasaran dan permodalan hal tersebut masuk kedalam peraturan walikota yang bertujuan untuk membantu UMKM.

A. Pendampingan

Pendampingan dirancang pemerintah untuk memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan kepada pelaku Usaha Koperasi dan UMKM agar dapat meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan daya saing usaha mereka. Program ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi, seperti keterbatasan modal, manajemen usaha yang kurang baik, akses pasar yang terbatas, atau kurangnya pengetahuan tentang teknologi dan inovasi serta memberikan bantuan dalam hal legalitas usaha, seperti pendaftaran merek, perizinan usaha, dan aspek hukum lainnya.

a. Pendampingan Sertifikasi Halal

Pendampingan sertifikasi halal merupakan layanan yang bertujuan untuk memandu dan memfasilitasi pelaku usaha dalam proses memperoleh sertifikasi halal. Melalui pendampingan ini, pelaku umkm DI Kelurahan Kandri dibantu dalam memenuhi seluruh persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh otoritas halal. Tujuannya adanya program pendampingan ini untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan regulasi yang berlaku. Pendampingan ini tidak hanya mempercepat proses sertifikasi, tetapi juga meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya jaminan halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar global.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan mas chafid selaku manajemen koperasi dan UMKM Kota Semarang beliau menyatakan bahwa.

“Untuk pendampingan dari kita itu melalui 4P tadi salah satunya terkait perizinan, disitu kita melakukan pendampingan atau monitoring kepada UMKM yang belum melakukan verifikasi untuk sertifikasi terlebih dahulu agar produk mereka bisa masuk ke mitra yang sudah kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM ini supaya bisa berkembang lebih luas untuk pemasarannya, dan setiap tahunnya kita ada kuota kurang lebih 200 dari 200 kuota itu dibagi

beberapa gelombang karena untuk sertifikasi halal tidak bisa cepat sehari langsung jadi.” (wawancara Mas Chafid 24 November 2024).

Dari data hasil wawancara menjelaskan bahwa adanya pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan peluang yang banyak untuk membantu UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal. Hal serupa juga dikatakan oleh Pak Suhono selaku anggota UMKM mekarsari:

“Untuk sertifikasi ada mba dari pemerintah dan itu biasanya setiap pelayanan akhir pekan juga bisa, kalo untuk sertifikasi rata-rata UMKM disini sudah bersertifikasi halal semua mba, kecuali yang baru-baru” (wawancara Pak Suhono 04 Februari 2025).

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa adanya pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang terhadap pelaku UMKM guna membantu untuk mendapatkan izin halal. Dari hasil wawancara dengan Pak Suhono diperkuat oleh pernyataan Ibu Eni selaku UMKM di Kelurahan Kandri:

“Untuk sertifikasi halal, izin itu sudah ada mba hampir semua UMKM disini sudah bersertifikat kecuali yang baru-baru,” (wawancara Ibu Eni 12 Februari 2025).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa pendampingan sertifikasi halal sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap UMKM dan hampir semua UMKM di Kelurahan Kandri sudah bersertifikat halal.

Gambar 2 Pendampingan Fasilitas Perizinan



Sumber : Instagram Dinkop Kota Semarang

2. Pelayanan Akhir Pekan

Pendampingan pelayanan akhir pekan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah program untuk memberikan bimbingan, dukungan, atau asistensi kepada pelaku UMKM setiap akhir pekan. Program ini biasanya dilaksanakan pada akhir pekan untuk memudahkan pelaku usaha yang mungkin sibuk selama hari kerja. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di wilayah Kota Semarang. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Ibu Eni selaku UMKM di Kelurahan Kandri beilau menyatakan.

“Untuk pendampingan itu masuknya di pelayanan akhir pekan, biasanya di minggu terakhir setiap bulannya” (wawancara Ibu Eni 12 Februari 2025)

Berdasarkan data hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa adanya pendampingan pelayanan akhir pekan yang dilakukan oleh Pemerintah, pada pelaksanaanya dilakukan setiap minggu terakhir setiap bulannya. Hal tersebut, diperkuat dengan pernyataan

Pak Suhono selaku anggota UMKM Mekarsari dalam pernyataannya beliau mengatakan.

“Itu ada mba setiap satu bulan sekali ada yang Namanya pelayanan akhir pekan, itu program dari pemkot itu dilaksanakan di masing-masing kecamatan, karena tingkatnya kecamatan ya mba jadi di bagi, disitu yang beli hanya pejabat mba misalnya bu lurah atau pak camat, Itu menyediakan kalo misal mau perizinan halal itu bisa disitu,” (wawancara Pak Suhono 04 Februari 2025)

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa adanya pelayanan akhir pekan tidak untuk pendampingan saja melainkan menyediakan bazar di setiap pelaksanaanya. Dengan adanya pendampingan pelayanan akhir pekan sangat membantu masyarakat dalam mengalami kesulitan namun tidak ada waktu di hari kerja, selain pendampingan pelayanan sertifikasi, bazar namun pada pelayanan akhir pekan ini juga pelaku UMKM bisa melakukan konsultasi Ketika mengalami kesulitan atau permasalahan yang dialami.

Gambar 4 Pendampingan Pelayanan Akhir Pekan



Sumber : Instagram Dinkop Kota Semarang

Gambar 6 Pendampingan Pelayanan Akhir Pekan



Sumber : Instagram Dinkop Kota Semarang

B. Pelatihan

Pelatihan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang merupakan program kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas pelaku UMKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing usaha, memperkuat manajemen serta mendorong kewirausahaan di masyarakat. Berbagai jenis pelatihan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, seperti pelatihan pengemasan dan manajemen untuk mengembangkan UMKM. Hal ini juga disampaikan dalam wawancara dengan Ibu Anis selaku pengawas Koperasi dan UMKM Kota Semarang beliau menyampaikan.

“Untuk pelatihan kita ada yang namanya kursus singkat bagi pelaku Usaha mikro itu jadi satu hari kalo pelatihannya itu ada 3 hari minimal 20 orang yang bersurat ke dinas koperasi yang diajukan guna pelatihan itu gratis, misalnya kalo kursus singkat itu kan kita tentang kalo mau packing, coffe briefing atau foto produk, dan untuk pelatihan pelatihan lainnya itu kita langsung ke kelurahan untuk pelatihannya. Dan untuk kursus singkat tadi itu kita ada gedung namanya LPTK UMKM pusat layanan terpadu koperasi UMKM Kota Semarang dalam rangka

membangun pembangunan UMKM dan sudah disediakan konsultan. untuk kursus singkat itu gratis karena termasuk fasilitas UMKM. dan kita juga ada pelatihan manajemen mikro itu belajar tentang bagaimana memanajemen uang yang bagus, misal sudah punya usaha tapi belum bisa cara memenej keuangan yang baik nah kita berikan pelatihan tersebut” (wawancara Ibu Anis 24 November 2025)

Program pelatihan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas pelaku UMKM. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Mutmainah selaku Lurah Kelurahan Kandri beliau menyatakan.

“Ada mba terkait program pemberdayaan seperti pelatihan packaging agar UMKM semakin berkembang, kita terus memfasilitasi untuk penjualan online dan packaging yang bagus, biasanya kita mengundang pemateri dari dinas langsung atau dari provinsi terkait permasalahan tadi packaging dan pemasaran online.” (Wawancara Ibu Mutmainah 12 Desember 2024)

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa program pelatihan tidak hanya diberikan oleh Pemerintah Daerah saja melainkan dari Pemerintah setempat juga membantu dalam mengadakan pelatihan untuk membantu UMKM. Hal ini juga disampaikan oleh Pak Suhono selaku anggota UMKM Mekarsari.

“Dari pemerintah sudah ada program program untuk masyarakat khususnya umkm seperti perizinan dan pelatihan, setelah kami mendapat pelatihan baik itu dari awal sampai pengemasan itu lumayan membantu mba”(Wawancara pak Suhono 04 Februari 2025).

Program Pelatihan yang dikeluarkan oleh Pemerintah memberikan dampak baik terhadap UMKM dalam mengembangkan usahanya, melalui pelatihan yang diberikan UMKM bisa mempromosikan usahanya lebih luas. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Eni selaku UMKM di Kelurahan Kandri dalam pernyataanya beliau menyatakan.

“Untuk pelatihan itu ada mba itu pelatihan terus mulai inovasi produk terus pengemasan, pemasaran jaman sekarang kan digital ya jadi pasti pelatihan tentang pemasaran digital.” (wawancara Ibu Eni 12 Februari 2025).

Selain adanya pelatihan manajemen dan pengemasan yang diberikan oleh pemerintah ada juga pelatihan pemasaran digital yang bertujuan untuk memasarkan produk UMKM lebih luas. dampak dari program pelatihan yang diberikan baik pelatihan pengemasan dan pemasaran sangat dirasakan oleh pelaku UMKM di Kelurahan Kandri. Hal tersebut, selaras dengan pernyataan yang diberikan mas Sadam selaku UMKM Seni di Kelurahan Kandri.

*“Pernah mba, kalo untuk pelatihan itu udah sering, Kalo untuk peran pemerintah itu sudah bagus mba mulai dari program pelatihan sampe pemasaran itu udah bagus mulai dari pelatihan sampe pemasaran.”
(wawancara Mas Shadam 12 Februari 2025).*

Pemerintah terus berupaya dalam mengembangkan UMKM selain pelatihan yang diberikan guna untuk mengembangkan UMKM, Pemerintah juga mengeluarkan program pemasaran yang diberikan kepada pelaku UMKM.

Gambar 8 Program Pelatihan UMKM



Sumber Intagram Dinkop Kota Semarang

Gambar 10 Pelatihan Pengemasan



Sumber : Arsip Foto UMKM Kelurahan Kandri

C. Pemasaran

Program pemasaran yang diberikan pemerintah berupa pelatihan digital marketing dan bekerjasama dengan beberapa lembaga usaha untuk mempromosikan produk UMKM, tujuan utama dari program ini adalah untuk membantu UMKM dalam memasarkan produk mereka secara lebih efektif, meningkatkan penjualan, dan memperluas pangsa pasar. Seperti Mengadakan atau mengikutsertakan UMKM dalam pameran dagang, expo, atau bazar untuk mempromosikan produk mereka kepada calon pembeli dan konsumen. Dalam marketing pemasaran pemerintah memberikan pelatihan dan workshop tentang strategi pemasaran, branding, dan digital marketing kepada pelaku UMKM agar mereka dapat memasarkan produk mereka dengan lebih baik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Mas Chafid Selaku bagian Manajemen Koperasi dan UMKM Kota Semarang beliau menyatakan.

“Kita itukan ada pendidikan dan pelatihan yang mana di pendidikan dan pelatihan itu kadang kita ngasih tentang bagaimana caranya memasarkan produk nya itu di media sosial mulai poto produknya sampai memasarkannya lewat instagram atau e-commerce lainnya, terus kita juga

menjalin kemitraan yang ada di salah satu 4P tadi Pemasaran, untuk mitra nya tadi sudah dijelaskan ya salah satunya Indomaret. Tapi ada juga indomaret yang kerjasama langsung dengan UMKM tanpa diketahui oleh kami tetapi itu balik lagi ke pihak indomaretnya sendiri.” (Wawancara Mas Chafid 24 November 2025)

Pemerintah terus berupaya dalam memaksimalkan program pemasaran, pemerintah sudah bekerjasama dengan beberapa Lembaga usaha untuk membantu UMKM mempromosikan dan menjualkan produk usahanya lebih luas. Namun dalam pelaksanaannya program pemasaran dari pemerintah belum terlaksana secara maksimal. Hal ini juga disampaikan oleh Mas Shadam selaku anggota UMKM Mekarsari beliau menyatakan.

“Kalo fasilitas ruang usaha itu ada mba, Namanya galeri besar tempatnya di Bandara Ahmad Yani itu khusus UMKM Jateng saya termasuk anggota nya barang saya ada disana, namun itu belum maksimal mba dalam pelaksanaannya” (Wawancara Mas Shadam 12 Februari 2025).

Adanya program pemasaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah tersampaikan kepada pelaku UMKM namun dalam pelaksanaannya belum maksimal, hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Eni selaku UMKM di Kelurahan Kandri beliau menyatakan.

“Itu ada, tapi ngga semua bermitra kaya ke bandara itu susah buat masuk mba karena ada standar sendiri, sebenarnya dari pemerintah menyediakan mitra tapi untuk standar masuknya susah mba, akhirnya kita memilih buat memasarkan sendiri.”(wawancara Ibu Eni 12 Februari 2025).

Adanya mitra yang disediakan oleh pemerintah telah diketahui oleh pelaku UMKM namun dalam pelaksanaannya cukup dirasakan belum tepat oleh pelaku UMKM mulai dari administrasi dan syarat ketentuan yang sedikit terbilang rumit dan susah nya penjualan produk untuk bisa masuk kedalam mitra penjualan.

Gambar 12 Galeri Seni Dan Rasa Bandara Ahmad Yani



Sumber : Instagram sukses kita

D. Permodalan

Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan beberapa program permodalan untuk mendukung pengusaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta masyarakat umum dalam mengembangkan usahanya. Program ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dalam mengembangkan usahanya melalui pemberian pinjaman modal dengan bunga rendah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bpk chafid selaku bagian manajemen koperasi dan UMKM Kota Semarang beliau mengatakan.

*“Dalam memfasilitasi UMKM ada permodalan, ada yang namanya kredit wibawa dan bunganya itu setahun 3% yaitu dengan syarat masyarakat yang berdomisili di Kota Semarang dan mempunyai NIB, terus kalo dari pemerintah pusat ada KUR melalui bank BRI, Mandiri, BNI, BRI dan bank Jateng dengan bunga 6% setahun limitnya bisa sampe 100-500 jt setahun setiap satu KTP tapi itu ada hak gunanya, dan terus yang kredit wibawa itu bisa 5jt tanpa hak guna kalo mau lebih dari itu pakai hak guna.”
(Wawancara Bpk Chafid, 26 November 2024)*

Adanya bantuan permodalan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang dapat membantu pelaku UMKM dalam mengalami hambatan permodalan selain fasilitas dari pemerintah permodalan juga

memiliki bunga yang rendah. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Mutmainah selaku lurah Kandri beliau menyatakan.

“Karena disini itu mayoritas ngambilnya KUR itu biasanya langsung dari bank Bri nya sendiri mba, biasanya petugas datang ke kelurahan kulonuwun terus nanti mereka sendiri yang langsung terjun ke bawah ke pelaku UMKM nya jadi dari pemerintah Kelurahan hanya sekedar memberikan izin saja untuk selanjutnya itu dari pihak BRI nya langsung mba seperti itu.” (wawancara Ibu Mutmainah 12 Desember 2024)

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa adanya KUR dari Bank BRI yang langsung menemui masyarakat untuk menawarkan pinjaman permodalan lewat perizinan dari pemerintah Kelurahan Kandri. Hal ini juga disampaikan oleh Pak Suhono selaku anggota UMKM Mekarsari.

“Terkait itu semacam pinjaman itu ada mba, biasanya kalo umkm kurang modal kita disarankan untuk pinjaman itu namanya KUR atau Kredit wibawa dan Bank BRI” (wawancara Pak Suhono 04 Februari 2025)

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa adanya bantuan modal dari pemerintah telah tersampaikan kepada pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal dalam mengoperasikan produk usahanya. Hal ini ini juga dikatakan oleh ibu eni sebagai pelaku UMKM di Kelurahan Kandri.

“Kalo untuk modal memang kita diarahkan bantuan seperti Kredit wibawa mba, itu dari Dinas koperasi maksimal 25 juta tanpa jaminan tapi persyaratannya harus sesuai” (wawancara Ibu Eni 12 Februari 2025)

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa adanya bantuan pinjaman dari pemerintah dengan bunga yang rendah dan tanpa jaminan untuk peminjaman dengan maksimal 25 juta.

Gambar 14 Fasilitas Akses Pembiayaan



Sumber Instagram Dinkop Kota Semarang

Melalui program-program ini, Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM agar dapat berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang dibawa oleh Jim Ife yang digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan dan program pemberdayaan UMKM yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang. Dalam jenis pemberdayaan Jim Ife terdapat empat perspektif yaitu perspektif pluralis, perspektif elite. Perspektif struktural, perspektif Post-struktural, dari hasil analisis ini mengenai kebijakan dan program yang dikeluarkan pemerintah Kota Semarang masuk kedalam perspektif pluralis dengan jenis kekuasaan atas definisi kebutuhan. Hal tersebut didasarkan karena adanya tugas dan fungsi dari pemerintah selaku pemangku kekuasaan untuk membantu sekelompok masyarakat yang kurang berdaya yang ditujukan kepada pelaku UMKM di Kelurahan Kandri yaitu dengan kebijakan dan program yang dikeluarkan seperti peraturan walikota Semarang No 66 Tahun 2022 dengan jenis program pendampingan, pelatihan, permodalan dan pemasaran untuk membantu UMKM agar lebih berdaya.

BAB V

FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM DI KELURAHAN KANDRI

Pada Bab ini akan menanggapi pertanyaan kedua dalam penelitian, terkait dengan bagaimana faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan UMKM di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. maka dari itu penulis akan membahas mengenai dampak dari kebijakan dan program yang dikeluarkan terhadap perekonomian dan bagaimana evaluasi dari kebijakan dan program tersebut.

Kebijakan dan program dalam suatu peraturan memiliki tujuan untuk mengentaskan permasalahan yang ada, Pemerintah Kota Semarang yang ditujukan kepada pemerintah merupakan lembaga Pemerintahan Daerah yang memiliki peran penting dalam kemajuan UMKM untuk perekonomian daerah. Berdasarkan Undang-undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM pada pasal 6 berbunyi bahwa pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangann Usaha. Setiap tahunnya pemerintah memfasilitasi dengan memberikan pendampingan, pelatihan, permodalan dan pengemasan. Dalam perumusan rencana kerja program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, mendapati adanya beberapa permasalahan pokok yang menjadi fokus utama dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Semarang. Salah satunya ialah minimnya tingkat partisipasi UMKM dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam permasalahan tersebut terdiri dari beberapa faktor.

A. Faktor struktural

1. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

Keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan UMKM di Kelurahan Kandri. Pemerintah daerah seringkali menghadapi keterbatasan dana dalam mendukung berbagai program pelatihan, pendampingan bagi pelaku usaha kecil. Minimnya alokasi anggaran

menyebabkan program pemberdayaan tidak dapat berjalan secara maksimal, baik dari segi cakupan maupun efektivitasnya.

Tabel 3. 7 Data Anggaran Pemberdayaan UMKM

Program	Tahun 2023	Tahun 2024
Pelatihan	Rp. 1.353.917.828,00	Rp. 1.353.917.828,00
Pendampingan	Rp. 1.583.683.800,00	Rp. 1.583.683.800,00
Permodalan	Rp. 5.376.999.717,00	Rp. 5.376.999.717,00

Sumber : Perwalkot Kota Semarang No 7 Tahun 2024

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa tidak ada perubahan atau penambahan anggaran pada program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga hal ini menjadi salah satu faktor dalam memaksimalkan program pemberdayaan hal ini juga disampaikan oleh Ibu Anis selaku Pengawas Koperasi dan UMKM dalam pernyataanya beliau menyatakan.

“Untuk anggaran tahun ini memang tidak ada perubahan mba jadi ini menjadi kendala kita dalam pelaksanaan program ” (wawancara ibu anis 24 november 2024)

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa tidak ada penambahan dalam anggaran pemberdayaan sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam menjalankan program yang dikeluarkan. Hal ni juga disampaikan oleh ibu Mutmainah selaku kepala lurah kandri.

“untuk sekarang bantuan modal yang diberikan itu gaada mba, adanya ya itu bantuan pinjaman kredit wibawa, jadi kalo kita butuh modal ya ngajuin pinjaman selain itu ya bantuannya berupa pelatihan gitu”(wawancara Ibu Mutmainah 12 Desember 2024).

Berdasarkan data diatas menjelaskan pemerintah tidak memberikan bantuan modal secara langsung, melainkan melalui pinjaman yang disebut dengan kredit wibawa, selain itu bantuan modal yang diberikan yaitu berupa pelatihan. Hal ini juga selaras dengan pernyataan yang di berikan oleh Pak Suhono selaku anggota UMKM Mekarsari beliau menyatakan.

“untuk kebutuhan modal itu pemerintah menyediakan pinjaman saja mba, sekarang kalo butuh itu ngajuinnya barang jadi kita Cuma bisa

mengajukan bantuan barang saja kalo bantuan secara tunai itu gabisa” (wawancara Pak Suhono 04 Februari 2025).

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa saat ini UMKM hanya bisa mengajukan bantuan berbentuk barang untuk membantu mengembangkan usahanya, hal ini juga disampaikan oleh mas shadam selaku UMKM di Kelurahan Kandri.

“modal dari pemerintah itu berupa barang mba itu juga gabisa banyak hanya kebutuhan tertentu saja, paling selain itu ya ngajuin pinjaman,”

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa pemerintah telah berupaya dalam memberikan bantuan modal, namun modal yang diberikan berbentuk barang serta pinjaman.

Keterbatasan anggaran dan sumber daya dalam pelaksanaan program pemerintah menjadi hambatan besar dalam maksimalnya program yang diberikan. Selain itu, sumber daya manusia yang tersedia untuk mendampingi dan membina UMKM juga terbatas, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Pendamping UMKM yang memiliki keahlian khusus dalam bidang pemasaran, manajemen usaha, dan digitalisasi masih kurang, sehingga banyak pelaku UMKM di Kelurahan Kandri kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai serta tenaga pendamping yang kompeten, upaya pemberdayaan UMKM kurang memberikan dampak nyata.

B. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau SDM menjadi faktor krusial dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan UMKM di Kelurahan Kandri. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi keterbatasan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam mengelola usaha mereka secara profesional. Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya akses terhadap pelatihan kewirausahaan menyebabkan banyak UMKM di Kelurahan Kandri kesulitan dalam aspek manajemen, pemasaran, serta penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing mereka. Selain itu, kurangnya kesadaran dan motivasi sebagian pelaku

usaha untuk berinovasi juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak dari mereka masih mengandalkan metode bisnis tradisional dan kurang responsif terhadap perkembangan pasar yang dinamis. Hal ini disampaikan oleh Mas Chafid selaku manajemen koperasi dan UMKM beliau menyatakan.

“pemerintah kan sudah mengeluarkan kebijakan peraturan dan program untuk membantu UMKM namun masih belum maksimal dalam pelaksanaannya misalnya ada pelatihan dari kita tapi UMKM yang hadir hanya beberapa saja sehingga program yang kita berikan tidak maksimal karena tidak sampai sasaran” (wawancara mas Chafid 24 November 2024).

Data diatas menjelaskan bahwapemerintah telah berupaya untuk membantu UMKM melalui kebijakan dan program yang di keluarkan, namun masih mengalami kendala karena minimnya UMKM yang mengikuti kegiatan yang diberikan oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Mutmainah selaku kepala lurah Kandri.

“sejuhu ini untuk memberikan informasi tentang pengembangan UMKM itu sudah terlaksana dan tidak ada hambatan cuma ya balik lagi sama pelaku UMKM nya sendiri.” (wawancara Ibu Mutmainah 12 Desember 2024)

Data diatas menjelaskan bahwa pemerintah sudah berupaya untuk membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya namun masih terdapat faktor sumber daya dalam pelaksanaannya.

Hal ini juga selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh Ibu Eni selaku UMKM di Kelurahan Kandri.

“Untuk hambatan itu ya mba pemerintah kan sudah memberikan pelatihan digital tapi kan SDM disini yang masih kurang memahami dalam hal digital, seperti wa bisnis itu kan aslinya kalo paham bisa memasarkan produk di situ tap ikan karena kita kurang memahami akhirnya menjadi salah satu kendala dalam memasarkan produk.” (wawancara Ibu Eni 12 Februari 2025).

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa minimnya pengetahuan masyarakat Kelurahan Kandri tentang digital sehingga menjadi salah satu kendala dalam memasarkan produknya, sehingga memerlukan

pendampingan lebih untuk membantu UMKM dalam memasarkan produk usahanya. Selain minimnya pengetahuan faktor lain yang menjadi pengaruh dalam pelaksanaan program adalah keterbatasan tenaga pendamping atau fasilitator yang memiliki kompetensi dalam membina dan mendukung pengembangan UMKM. Tanpa adanya peningkatan kapasitas SDM yang memadai, kebijakan dan program pemberdayaan yang telah dirancang sulit untuk mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan akses terhadap pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi dan daya saing pelaku UMKM di Kelurahan Kandri.

C. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi UMKM

Rendahnya kesadaran dan partisipasi pelaku UMKM di Kelurahan Kandri dalam program pemberdayaan menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengembangan sektor usaha kecil di Kelurahan Kandri. Banyak pelaku UMKM yang kurang memahami pentingnya mengikuti pelatihan, pendampingan, atau program bantuan yang disediakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi, ketidakpercayaan terhadap efektivitas program, atau anggapan bahwa usaha mereka dapat berjalan tanpa perlu peningkatan kapasitas. Selain itu, sebagian UMKM masih bersikap pasif dan enggan untuk berinovasi, terutama dalam menerapkan strategi bisnis yang lebih modern seperti pemasaran digital dan diversifikasi produk.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Mas Chafid selaku Manajemen Koperasi dan UMKM dalam pernyataannya beliau menyatakan:

“tapi dari kita sudah berusaha untuk memaksimalkan dalam membantu UMKM dan kita juga menyediakan fasilitas berbentuk klinik bisnis berupa chat Whatsapp, jadi kalo ada pelaku UMKM yang kebingungan bisa menanyakan lewat chat itu dan setiap ada informasi pelatihan atau sertifikasi dan lainnya kita selalu membuat informasi dan disampaikan lewat media sosial Instagram atau grup whatsapp, namun kadang ada pelaku UMKM yang masih tertinggal akan informasi yang disampaikan sehingga itu menjadi salah satu kendala kita kurangnya tersampaikan informasi kepada para pelaku UMKM sehingga ada beberapa pelaku UMKM yang masih tertinggal dalam kegiatan yang dikeluarkan oleh

Dinas Koperasi dan UMKM ini.” (wawancara mas chafid 24 November 2024).

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa adanya kendala atau faktor yang dialami Pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan kebijakan dan program nya, hal ini juga sesuai dengan pernyataan Ibu Mutmainah selaku Lurah Kandi. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Ibu Mutmainah selaku Kepala Lurah Kandri beliau menyatakan.

“Kalo kendala si sekarang karena serba online ya mbak ya jadi lebih efisien karena para pelaku UMKM disini sudah masuk grup jadi untuk kendala dalam penyampaian informasi itu sejauh ini belum ada, semisal ada informasi terkait sertifikasi nah itu langsung kita infokan mba, Cuma kadang dari pelaku UMKM sendiri yang belum memenuhi syarat, jadi sejauh ini untuk memberikan informasi tentang pengembangan UMKM itu sudah terlaksana dan tidak ada hambatan cuma ya balik lagi sama pelaku UMKM nya sendiri.” (wawancara Ibu Mutmainah 12 Desember 2024).

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa pemerintah sudah berupaya dalam memberikan dukungan untuk mengembangkan UMKM namun minat partisipasi pelaku UMKM di Kelurahan Kandri masih minim. Pernyataan tersebut juga selaras dengan yang dikatakan Mas Shadamselaku UMKM di Kelurahan Kandri.

“pemerintah tuh sudah bagus mba mengeluarkan program pelatihan dan sejenisnya namun kadang dari UMKM nya sendiri yang kurang ikut berpartisipasi masih rendah untuk menjangkau sampe sana, karena disini itu mau ikut kalo ada kertas” (wawancara Mas shadam 12 Februari 2025).

Data diatas menjelaskan bahwa program pemerintah belum sepenuhnya diikuti oleh pelaku UMKM di Kelurahan Kandri hal tersebut terjadi karena minimnya kesadaran akan program yang diberikan. Minimnya partisipasi ini menghambat efektivitas kebijakan pemberdayaan karena program yang telah dirancang tidak dapat menjangkau dan memberikan manfaat optimal bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih persuasif dalam mensosialisasikan program pemberdayaan serta strategi yang lebih inklusif untuk meningkatkan partisipasi aktif UMKM, seperti melalui komunitas bisnis, kolaborasi

dengan akademisi, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha yang berpartisipasi dalam program pengembangan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM di Kota Semarang studi: Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, pemerintah Kota Semarang telah menerapkan kebijakan dan program untuk mendukung pemberdayaan UMKM. Upaya ini diwujudkan melalui peraturan Walikota Semarang No. 66 Tahun 2022 yang mencakup empat aspek utama dalam pemberdayaan UMKM, yaitu pendampingan, pelatihan, permodalan, dan pemasaran. Program pemberdayaan UMKM melalui program 4P sudah tersampaikan kepada pelaku UMKM di Kelurahan Kandri, namun untuk program pemasaran dalam pelaksanaannya belum maksimal karena masih banyak UMKM yang merasa kesulitan dalam administrasi atau persyaratan untuk masuk kedalam mitra kerjasama pemasaran yang di sediakan Pemerintah Kota Semarang.

Kedua, dalam pelaksanaan program yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaannya belum maksimal hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Faktor struktural ,program yang dikeluarkan dalam pelaksanaannya mengalami kendala, seperti pelatihan yang kurang optimal yang menjadi penyebab pelaku UMKM tidak sepenuhnya memahami manfaat dari pelatihan yang diberikan. Selain itu adanya Pengurangan anggaran untuk pemberdayaan UMKM menyebabkan keterbatasan dalam pendampingan, pelatihan, pemasaran dan permodalan. Serta jumlah dan kompetensi tenaga pendamping masih terbatas, sehingga UMKM kesulitan mendapatkan bimbingan yang efektif dalam pengembangan usaha.

- b. Faktor Sumber Daya, rendahnya pengetahuan tentang digital dan keterampilan manajerial pada pelaku UMKM di Kelurahan Kandri menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing mereka.
- c. Rendahnya kesadaran dan partisipasi UMKM, banyak pelaku UMKM yang belum aktif dalam mengikuti program pemberdayaan, karena kurangnya informasi, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya program yang diberikan oleh pemerintah

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan beberapa rekomendasi:

1. Melihat dari metode pelaksanaan kebijakan dan program dalam pemberdayaan UMKM di Kota Semarang, sejauh ini hanya berfokus pada pelatihan pengemasan dan pemasaran digital namun tanpa memperhatikan usia pelaku UMKM yang kurang paham tentang digital sehingga masih tertinggal dalam melakukan pemasaran secara online, maka perlu adanya penambahan mitra Kerjasama agar UMKM dapat maksimal memasarkan produknya, serta perlu strategi sosialisasi yang lebih inklusif dan persuasif guna meningkatkan partisipasi UMKM dalam program pemberdayaan.
2. Untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini diharapkan dapat mengkaji hal-hal yang belum sempat diteliti, serta dapat melakukan observasi secara maksimal terhadap pemerintah khususnya dalam mengembangkan UMKM, peneliti juga berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Andiny, P., & Nurjannah, N. (2018). Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa. *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis*, 5.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Rineka Cipta.
- Budiman, J. (n.d.). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Umkm Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia*. 12.
- Bungin, B. (2011). *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*. (Pertama). kencana prenatal media group.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Diatmika, G. P., & Rahayu, S. (2022). *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah*. Ahli Media Book.
- Djaenur, A., & Enceng. (2012). Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah. *Sistem Pemerintahan Daerah*.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Jurnal MODERAT*, 6(1).
- Fajrin, M. (n.d.). *Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Kandri (Lokasi Studi: Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang)* [Doctoral dissertation]. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Firman, A. A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Berbasis Komunitas. *Jurnal Tata Sejuta STIA MATARAM*. Vol.7 No.1. P-ISSN 2442-9023, E-ISSN 2615-0670
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and*

- Creative Economy*, 1(2), 82–110. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>
- Harahap, A. N., & Tambunan, K. (2022). UMKM Dan Pembangunan. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 2(2), 228–235. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i2.652>
- Hidayat. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis. [Skripsi]. Universitas Garut
- Jaelani, M. A., & Fidaris, N. (2024). Evaluasi Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM di Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(2), 151–162. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4953>
- Jim Ife, F. T. (2008). *Community Development- Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Krisna. (2016). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *SOSIO INFORMIA: Politehnik Kesejahteraan Sosial*. (p-ISSN 2442-8094 / e-ISSN 2502-7913)
- Laksmi, P. A. S., & Arjawa, I. G. W. (2023). Peran Pemerintah Dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 4(3), 12–21. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol4iss3pp12-21>
- Luthfi, Y. (2024). Pemberdayaan Pelaku Usaha Rumahan. [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan UMKM)*. 3(3).
- Qomari, R. (2009). Teknik Penelusuran Analisis Data Kuantitatif dalam Penelitian Kependidikan. *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 14(3), 527–539. <https://doi.org/10.24090/insania.v14i3.372>
- Rabiah, S., Hertati, L., Puspitawati, L., Gantino, R., & Ilyas, M. (2022). Pengaruh Basis Pemberdayaan Masyarakat Desa Terhadap Kreativitas Kelompok

- Masyarakat Desa Guna Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Desa Era Covid-19. *Indonesia Berdaya*, 3(1), 1–20.
<https://doi.org/10.47679/ib.2022171>
- Rahmah, I., Kaukab, E. M., & Yuwono, W. (2020). Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM. *Jurnal CAPITAL*, 3(2).
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Roesmidi, & Risyanti, R. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat*. Alqaprint Jatinangor.
- Sekaran, U., & Roger, B. (2016). *Research Methods For Business; A Skill-Building Approach*. John Wiley & Sons Ltd.
- Siregar, P. S., & Mersi, W. J. (2021). UMKM Kunci Indonesia Keluar Dari Middle Income Trap. *Inspire Journal: Economics and Development Analysis*, 1(1), 87–98.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–8.
- Wulansari, A., Lukmanul, H., & Rachmat, R. (2021). Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(1).
- Yunani, A. (2022). *Isu-isu perencanaan pembangunan (teori dan praktek)*.

LAMPIRAN

A. Daftar Lampiran 1 Pertanyaan Penelitian

1. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang
 - a. Apa saja kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kota Semarang terkait pengembangan UMKM?
 - b. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi untuk pembiayaan atau permodalan dari lembaga keuangan, baik itu melalui program kredit mikro, koperasi atau skema lainnya?
 - c. Apakah ada dukungan dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang membantu UMKM, seperti distribusi, pasar, atau pusat ruang usaha yang terjangkau?
 - d. Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan pelatihan meningkatkan keterampilan untuk pengelola UMKM, baik dalam hal manajerial, pemasaran, atau teknologi?
 - e. Apakah ada program pendampingan atau mentorship yang diberikan kepada UMKM untuk membantu mereka mengembangkan usaha?
 - f. Apakah pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, atau organisasi lain untuk mendukung pemberdayaan UMKM?
 - g. Sejauh mana kontribusi UMKM terhadap perekonomian di kota semarang?
 - h. Sejauh anggaran daerah mana alokasi pemerintah untuk pemberdayaan UMKM memadai untuk mencapai tujuan yang diinginkan?
 - i. Bagaimana pemerintah daerah membantu UMKM untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, seperti e-commerce, media sosial, atau penggunaan sistem digital dalam manajemen usaha?
 - j. Bagaimana hambatan Dinas Koperasi dan UMKMdalam melakukan pemberdayaan UMKM di Kota Semarang?

2. Pemerintah Kelurahan Kandri

- a. bagaimana kelurahan dalam mengkoordinasikan pelatihan atau program pemberdayaan UMKM dengan Dinas Koperasi?
- b. Bagaimana pemerintah Kelurahan Kandri dalam mendukung program pengembangan UMKM?
- c. Bagaimana kelurahan dalam mensosialisasikan program kredit wibawa atau KUR kepada pelaku usaha di Kelurahan Kandri?
- d. Apakah kelurahan menyediakan fasilitas seperti ruang usaha atau tempat pelatihan bagi pelaku UMKM?
- e. Bagaimana kelurahan mendukung UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal atau izin usaha?
- f. Apakah kelurahan terlibat dalam menjalin kerja sama dengan sektor swasta untuk mendukung UMKM di Kandri?
- g. Sejauh mana kontribusi UMKM terhadap perekonomian di Kelurahan Kandri
- h. Apakah ada program pendampingan atau mentorship dari Kelurahan Kandri yang diberikan kepada UMKM untuk membantu mereka mengembangkan usaha?
- i. Apa hambatan pemerintah Kelurahan Kandri dalam memberikan informasi tentang pengembangan kepada UMKM

3. Pertanyaan Pelaku UMKM di Kelurahan Kandri

- a. Bagaimana peran pemerintah daerah, termasuk dinas atau kelurahan, dalam mendukung usaha Anda?
- b. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan atau program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah? Jika ya, apa manfaat yang Anda rasakan?
- c. Apakah pemerintah daerah membantu dalam mempromosikan produk atau jasa Anda? Jika ya, bagaimana caranya?
- d. Apakah pemerintah daerah menyediakan fasilitas khusus, seperti ruang usaha, tempat pelatihan, atau bazar, untuk pelaku UMKM?

- e. Apakah Anda merasa fasilitas yang disediakan sudah memadai untuk kebutuhan UMKM?
- f. Apakah Anda mengetahui program kredit atau bantuan modal seperti KUR atau Kredit Wibawa?
- g. Apakah pemerintah daerah membantu menjalin kerja sama antara UMKM dengan sektor swasta atau lembaga pendidikan? Jika iya, Apakah kerja sama tersebut berdampak pada pengembangan usaha Anda?
- h. Apakah pemerintah daerah membantu Anda mendapatkan sertifikasi halal, izin usaha, atau dokumen legal lainnya?
- i. Apakah Anda pernah mendapatkan program pendampingan atau mentorship dari pemerintah daerah?
- j. Apa hambatan utama yang Anda alami dalam mengakses program atau dukungan dari pemerintah daerah?
- k. Apakah dukungan dari pemerintah daerah berdampak pada perkembangan usaha Anda secara signifikan?
- l. Menurut Anda, apa kebutuhan utama UMKM yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah?
- m. Apakah Anda memiliki saran untuk pemerintah daerah dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM?

B. Daftar Lampiran 2 Dokumentasi Bersama Narasumber

1. Wawancara Bersama Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang (24 November 2024)



2. Wawancara pak Suhono Anggota Asosiasi UMKM Mekarsari (04 Februari 2025)



3. Wawancara Mas Shadam selaku UMKM kerajinan seni Kelurahan Kandri (12 Februari 2025)



4. Wawancara Bersama Ibu Eni selaku UMKM di Kelurahan kandri (12 Februari 2025)

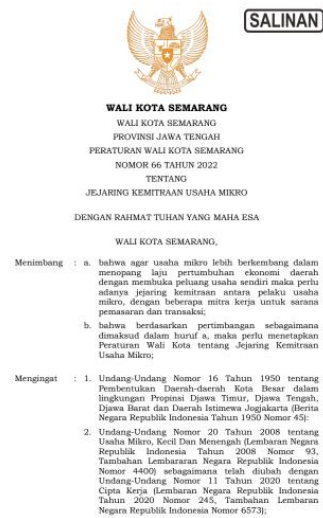


C. Daftar Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan UMKM Kelurahan Kandri



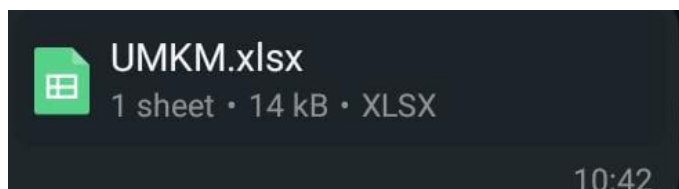
D. Daftar Lampiran 4 Dokumentasi Pendukung

a. Peraturan Walikota Semarang No. 66 Tahun 2022



- BAB II**
BENTUK JEJARING KEMITRAAN
- Pasal 6**
- (1) Bentuk Jejaring Kemitraan antara Pelaku Usaha Mikro dengan Mitra Usaha dilaksanakan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi:
- a. pendampingan, pelatihan, pemasaran dan permodalan;
 - b. jual beli;
 - c. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - d. penyediaan pasokan/titip jual.

b. Daftar UMKM Kelurahan Kandri Bukti chatt wa



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Jumsinah
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 21 April 2002
Alamat : Kp. Asem Lor, Ds.Binong, Kec.Pamarayan
Kab. Serang
Agama : Islam
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Handphone : 085781689615
E-mail : Jumsinah70@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Pabuaran (2008-20014)
2. SMPN 1 Pamarayan (2014-2018)
3. SMK Ikhlas Multiprogram Jawilan (2018-2020)
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2021-2025)

C. Riwayat Organisasi

1. Educational Development Gerakan Belajar Kreatif Ikhlas (2020-2021)
2. Anggota Pencak Silat Pagar Nusa UIN Walisongo Semarang (2022-2023)
3. Wakil Ketua Umum Fisip-Entrepreneur UIN Walisongo (2022-2023)
4. Wakil Kepala Bidang Usaha Kopma Walisongo UIN Walisongo Semarang (2023-2024)
5. Kepala Divisi PSDA Gerakan Belajar Kreatif Ikhlas (2023-2024)
6. Kepala Bidang Usaha Kopma Walisongo UIN Walisongo Semarang (2023-2024)
7. Tim Jurnal Mahasiswa Politik FISIP UIN Walisongo Semarang (2023-2024)
8. Dewan Pengawas Organisasi Gerakan Belajar Kreatif Ikhlas (2024-2025)
9. Awardee Beasiswa Bank Indonesia (2024)
10. Bendahara Divisi Minat dan Bakat GenBI (2024-2025)